

TESIS

**ANALISIS CAPAIAN STANDAR ISPO
(*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*)
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA SWADAYA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MORI UTARA
KABUPATEN MOROWALI UTARA)**

***ANALYSIS OF ISPO
(INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL)
STANDARD ACHIEVEMENT IN INDEPENDENT PALM OIL
PLANTATIONS (CASE STUDY IN NORTH MORI DISTRICT,
NORTH MOROWALI REGENCY)***

NURSYAMSA PATALOLO



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
PROGRAM MAGISTER
PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2026**

**ANALISIS CAPAIAN STANDAR ISPO
(INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL)
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA SWADAYA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MORI UTARA
KABUPATEN MOROWALI UTARA)**

***ANALYSIS OF ISPO
(INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL)
STANDARD ACHIEVEMENT IN INDEPENDENT PALM OIL
PLANTATIONS (CASE STUDY IN NORTH MORI DISTRICT,
NORTH MOROWALI REGENCY)***

Oleh
**NURSYAMSA PATALOLO
E32224012**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
PROGRAM MAGISTER
PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2026**

**ANALISIS CAPAIAN STANDAR ISPO
(INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL)
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA SWADAYA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MORI UTARA
KABUPATEN MOROWALI UTARA)**

**ANALYSIS OF ISPO
(INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL)
STANDARD ACHIEVEMENT IN INDEPENDENT PALM OIL
PLANTATIONS (CASE STUDY IN NORTH MORI DISTRICT,
NORTH MOROWALI REGENCY)**

Oleh
NURSYAMSA PATALOLO
E32224012

TESIS


Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Agribisnis
Program Studi Magister Agribisnis
Universitas Tadulako

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini,


Palu, 11 Maret 2026


(Dr. Rustom Abdul Rauf, SP., MP)
Ketua Tim Pembimbing


(Dr. rer. pol. Dewi Nur Asih, S.P., M.Si)
Anggota Tim Pembimbing


(Prof. Dr. Ir. Muhardi, M.Si., IPM., ASEAN Eng)
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Tadulako

Mengetahui,


(Dr. rer. pol. Dewi Nur Asih, S.P., M.Si)
Koordinator Program Studi
Magister Agribisnis

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Tesis) ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Universitas Tadulako maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palu, Maret 2026
Yang membuat pernyataan,

NURSYAMSA PATALOLO
No. Stb : E32224012

ABSTRAK

Nursyamsa Patalolo, (E32224012), Analisis Capaian Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya (Studi Kasus di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara), dibimbing oleh Rustam Abdul Rauf dan Dewi Nur Asih, 2026.

Standar capaian sertifikasi ISPO untuk pekebun swadaya terdiri dari lima prinsip yang harus diterapkan dan dilaksanakan pekebun, yaitu: kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, penerapan praktek perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, penerapan transparansi dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah mengukur seberapa besar capaian standar sertifikasi ISPO dan merumuskan rancangan strategi akan digunakan sebagai rekomendasi perbaikan untuk percepatan pemenuhan capaian standar sertifikasi ISPO Perkebunan kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Mori Utara. Penelitian dilakukan di Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara. Metode pengambilan data menggunakan metode survey dengan jenis data primer dari wawancara langsung ke pekebun dan sekunder dari instansi pemerintah. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 72 pekebun dan teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling. Metode analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian terhadap parameter yang diukur atau diamati pada saat audit dengan indikator yang terdapat dalam standar ISPO kemudian dinilai dalam persen dan analisis strategi menggunakan matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan realisasi capaian prinsip ISPO yaitu 63,87%. Dari 5 prinsip ISPO yang dinilai hanya 2 prinsip yang mendekati kriteria sangat tinggi yaitu Prinsip 2 (Penerapan praktek perkebunan yang baik) dan Prinsip 4 (Penerapan transparansi). Rekomendasi strategi pengembangan ISPO di perkebunan kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Mori Utara adalah: 1) mengikuti program pelatihan budidaya sesuai GAP dan pelatihan ISPO yang difasilitasi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan keterampilan pekebun, 2) memanfaatkan perkembangan teknologi seperti aplikasi manajemen kebun untuk mempermudah sistem pencatatan dan administrasi kebun yang selama ini masih lemah, dan 3) meningkatkan kesadaran dasar tentang isu lingkungan untuk mencegah praktik perkebunan yang salah, guna menghindari diskriminasi produk oleh regulasi pasar.

Kata Kunci : ISPO, pekebun swadaya, kelapa sawit, rekomendasi strategi

ABSTRACT

Nursyamsa Patalolo, (E32224012), Analysis of ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Certification Achievements in Independent Palm Oil Plantations (Case Study in North Mori District, North Morowali Regency), supervised by Rustam Abdul Rauf and Dewi Nur Asih, 2026.

The ISPO certification achievement standards for independent smallholders consist of five principles that must be applied and implemented by smallholders, namely: compliance with regulations and laws, implementation of good plantation practices, environmental management, natural resources, and biodiversity, implementation of transparency and sustainable business improvement. The purpose of this study is to measure the extent of the achievement of ISPO certification standards and formulate a strategic plan that will be used as a recommendation for improvement to accelerate the fulfillment of ISPO certification standards for independent oil palm plantations in North Mori District. The study was conducted in North Mori District, North Morowali Regency. Data collection employed a survey method, with primary data collected from direct interviews with smallholders and secondary data collected from government agencies. The study involved 72 smallholders, and the sampling technique used stratified random sampling. The data analysis method is carried out by comparing the assessment results of the parameters measured or observed during the audit with the indicators contained in the ISPO standard, then assessed in percentage and strategic analysis using the SWOT matrix. The results showed that the realization of ISPO principles was 63,87%. Of the 5 ISPO principles assessed, only 2 principles approached the very high criteria, namely Principle 2 (Implementation of good plantation practices) and Principle 4 (Implementation of transparency). The recommended ISPO development strategy in independent oil palm plantations in North Mori District is: 1) participating in cultivation training programs in accordance with GAP and ISPO training facilitated by the government and related institutions to improve the technical knowledge and skills of smallholders, 2) utilizing technological developments such as plantation management applications to simplify the plantation recording and administration system which has so far been weak, and 3) increasing basic awareness of environmental issues to prevent wrong plantation practices, in order to avoid product discrimination by market regulations.

Keywords: *ISPO, independent smallholders, oil palm, strategy recommendations*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian serta penyusunan Tesis yang berjudul “**Analisis Capaian Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya (Studi Kasus di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara)**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pertanian di Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Dr. Ir. Rustam Abd. Rauf, SP., MP.,IPM., pembimbing utama dan Ibu Dr. rer. Pol Dewi Nur Asih, SP. M.Si.,pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran dari awal bimbingan proposal sampai dengan selesainya penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih dan dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., IPU., ASEAN Eng., Rektor Universitas Tadulako.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhardi, M.Si., IPM., ASEAN Eng., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. rer. Pol Dewi Nur Asih, S.P, M.Si, Koordinator Program Studi Magister Agribisnis Universitas Tadulako.

4. Bapak Dr. Ir. Arifuddin Lamusa, S.P. M.P. IPM dan Bapak Dr. Sulaeman, S.P., MP, selaku Penguji Utama dan Penguji Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penulisan tesis.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Tadulako utamanya Dosen Magister Agribisnis yang telah mengajar, membimbing dan memotivasi selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Ayahanda tercinta H. Moh. Yasin Patalolo dan ibunda Hj. Saharia (Almarhumah), istri tercinta Niswanti, SE dan anak-anak tersayang atas dukungan doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman - teman Magister Agribisnis Angkatan 2024 yang saling berbagi memberi motivasi dan dukungan dalam suka dan duka yang dialami sejak awal hingga akhir masa studi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Palu, Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK DAN ABSTRACT	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Pustaka	13
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Tipe Penelitian	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	29
3.4 Populasi dan Sampel.....	30
3.5 Metode Analisis	32
3.6 Definisi Operasional Variabel	38
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.2 Pembahasan	45
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Status Pengusahaan (ha), Tahun 2016-2024	1
2. Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Tengah	5
3. Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kabupaten Morowali Utara, 2024	6
4. Indikator Prinsip dan Kriteria Standar ISPO bagi Pekebun Swadaya	18
5. Matriks SWOT	27
6. Jumlah Populasi Petani Kelapa Sawit di Lokasi Penelitian	30
7. Kriteria Pemenuhan Standar Capaian ISPO	34
8. Jumlah dan Persentase Responden Pekebun Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Mori Utara berdasarkan Umur	41
9. Jumlah dan Persentase Responden Pekebun Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Mori Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
10. Persentase Capaian Standar ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya yang diteliti.....	44
11. Perhitungan IFAS (Internal Factors Analysis Summary) Pengembangan Strategi Capaian Standar ISPO Pekebun Kelapa Sawit Swadaya di Kecamatan Mori Utara.....	56
12. Perhitungan EFAS (External Factors Analysis Summary) Pengembangan Strategi Capaian Standar ISPO Pekebun Kelapa Sawit Swadaya di Kecamatan Mori Utara.....	57
13. Matriks SWOT Analisis Pengembangan Strategi Capaian Standar ISPO Pekebun Kelapa Sawit Swadaya di Kecamatan Mori Utara	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran Analisis Capaian Standar ISPO Pekebun Swadaya	28
2. Capaian Bobot P1 (Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundangan) pada masing-masing desa yang diteliti	46
3. Capaian Bobot P2 (Penerapan Praktek Perkebunan yang Baik) pada masing-masing desa yang diteliti	48
4. Capaian Bobot P3 (Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati) pada masing-masing desa yang diteliti	50
5. Capaian Bobot P4 (Penerapan Transparansi) pada masing-masing desa yang diteliti	52
6. Capaian Bobot P5 (Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan) pada masing-masing desa yang diteliti	54
7. Matriks Kuadran SWOT Pengembangan Strategi Capaian Standar ISPO Pekebun Kelapa Sawit di Kecamatan Mori Utara	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuisisioner Penelitian	xii
2. Identitas Responden	xiii
3. Hasil Olahan Data	xiv
4. Dokumentasi Kegiatan	xv
5. Surat Keterangan Penelitian	xvi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan perkebunan kelapa sawit terbesar didunia yang menjadikan Indonesia sebagai produsen dan pengeksport utama minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil* atau CPO) sebagian negara di dunia (Riady dkk, 2023). Kelapa sawit sebagai penghasil *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan salah satu komoditas perkebunan dengan jumlah produksi yang tinggi dikarenakan kebutuhan produk turunannya tiap tahun terus meningkat dan produktivitas tanaman tersebut memang tinggi jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya (Rosmegawati, 2021).

Direktorat Jenderal Perkebunan (2023) menyatakan bahwa luas areal dan Perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Status Pengusahaan (ha), Tahun 2016-2024.

Tahun	Status Pengusahaan			Total Luas
	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta	Perkebunan Rakyat	
2016	707.428	5.754.719	4.739.318	11.201.465
2017	638.143	6.047.066	5.697.892	12.383.101
2018	614.756	7.892.706	5.818.888	14.326.350
2019	617.501	7.942.336	5.896.775	14.456.612
2020	565.241	7.977.298	6.044.058	14.586.597
2021	550.333	8.041.608	6.029.752	14.621.693
2022	548.311	8.576.838	6.213.407	15.338.556
2023	577.937	8.614.259	6.736.516	15.928.712
2024	559.572	8.577.445	6.876.022	16.013.039

Sumber : Statistik Tanaman Perkebunan Indonesia, BPS 2025

Pada tahun 2024, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 16,01 juta hektar. Perkebunan kelapa sawit tersebar di 29 provinsi, dengan Provinsi Riau sebagai daerah penghasil terbesar seluas 3,37 juta hektar (21,05% dari total nasional). Berdasarkan status perusahaan, perkebunan besar swasta mendominasi dengan luas 8,58 juta hektar (53,57%), diikuti perkebunan rakyat 6,88 juta hektar (42,94%), dan perkebunan besar negara 0,56 juta hektare (3,49%).

Tiga pola pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia yakni pola perusahaan, plasma dan swadaya. Menurut Yutika dkk (2019), dimana pengembangan perkebunan kelapa sawit pola perusahaan melibatkan perusahaan (inti) sebagai pengelola dan petani (plasma) sebagai pengelola kebun sendiri, dengan pendanaan dan pendampingan dari perusahaan. Pengembangan perkebunan kelapa sawit pola plasma adalah kemitraan antara perusahaan inti dan masyarakat petani sebagai plasma, di mana perusahaan wajib membangun kebun plasma minimal 20% dari luas izin usahanya. Pola swadaya merupakan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani sendiri, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pemasaran hasil tanpa melalui kemitraan usaha.

Terkait pengembangan perkebunan kelapa sawit, Cici dkk (2024), menegaskan opini kampanye negatif terkait perkebunan kelapa sawit baik di dalam maupun luar negeri semakin gencar, tuntunan yang sering dilontarkan di kalangan pemangku kepentingan adalah agar pembangunan kelapa sawit yang ada di Indonesia menerapkan sistem pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia memastikan keberlanjutan pengembangan industri minyak

kelapa sawit dengan membuat standar keberlanjutan yang disebut *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

ISPO pertama kali dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jendral Perkebunan. Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan perkebunan sawit berkelanjutan yang telah yang dimulai sejak tahun 2011, sejak keluarnya Permentan No 19 tahun 2011 pada tanggal 29 maret 2011, kemudian direvisi dengan terbitnya Permentan Nomor 11 tahun 2015 pada tanggal 25 maret 2015 yang hanya mewajibkan sertifikasi ISPO kepada Perusahaan baik tipe usaha integrasi, budidaya, maupun pengolahan dan berlaku sukarela bagi pekebun serta Perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk tujuan energi terbarukan.

Tahun 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), peraturan ISPO bersifat wajib baik untuk Perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk tujuan energi terbarukan maupun Pekebun swadaya atau plasma untuk memiliki sertifikasi ISPO. Pemberlakuan kewajiban untuk memiliki sertifikasi ISPO berlaku sejak Perpres No 44 Tahun 2020 diundangkan sedangkan untuk pekebun swadaya berlaku 5 tahun setelahnya yaitu 2025 (Permentan, 2020).

Pada tanggal 16 Januari 2020 komisi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) telah menerbitkan 621 sertifikat ISPO dari 779 pelaku usaha yang mengikuti sertifikasi ISPO. Sebanyak 621 sertifikat ISPO diterbitkan kepada perusahaan swasta sebanyak 558 sertifikat, PT Perkebunan Nusantara sebanyak 50 sertifikat, dan Koperasi Pekebun Plasma-Swadaya hanya sebanyak 14 sertifikat ISPO (Winarto, 2020).

Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang telah tersertifikasi ISPO per April 2024 baru mencapai 5.843.544,89 ha yang setara dengan implementasi ISPO sebesar 35,67 %. Sebanyak 1.077 pelaku usaha perkebunan yang berhasil memperoleh sertifikat ISPO. Data tersebut mencakup 80 Perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN) dengan luas mencapai 390.834,71 Ha, 909 perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang mengelola sekitar 5.392.992,41 Ha dan 88 pekebun Perkebunan Rakyat (PR) dengan total luas mencapai 59.717,88 Ha (Info Sawit, 2024).

Pemerintah berkeinginan untuk memperluas cakupan sertifikasi ISPO sampai ke pekebun swadaya dalam rangka meningkatkan keberterimaan ISPO. Standar ISPO untuk pekebun swadaya memuat 5 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu: Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, Penerapan praktik Perkebunan yang baik, Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, penerapan transparansi dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Namun terdapat sejumlah kendala yang menghambat penerapan ISPO, khususnya bagi petani swadaya (Rizka, 2023).

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi penyumbang hasil kelapa sawit di Indonesia. Luas lahan, produksi dan produktivitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tersaji pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Tengah.

No.	Tahun	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha/Tahun)
1.	2020	41.959,96	700.652,98	16,70
2.	2021	43.368,70	639.758,35	14,75
3.	2022	44.155,30	614.822,00	13,92
4.	2023	44.996,48	616.020,52	13,69
5.	2024	46.052,14	703.499,07	15,28
Total		220.532,58	3.274.752,91	
Rata-rata		44.106,52	654.950,58	14,87

Sumber : Statistik Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, ATAP 2020-2024

Rata-rata luas lahan yang tercatat selama periode 2020 hingga 2024 adalah 44.106,52 hektar. Secara umum, luas lahan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dari 41.959,96 hektar pada tahun 2020 menjadi 46.052,14 hektar pada tahun 2024. Rata-rata produksi yang dihasilkan adalah 654.950,58 ton. Angka produksi menunjukkan fluktuasi, di mana produksi sempat menurun dari tahun 2020 hingga 2022, lalu kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Rata-rata produktivitas lahan adalah 14,87 ton/Ha/tahun. Produktivitas menunjukkan rasio antara total produksi dengan luas lahan. Produktivitas juga menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 (16,70 ton/Ha/tahun) hingga 2023 (13,69 ton/Ha/tahun), sebelum akhirnya kembali naik pada tahun 2024 (15,28 ton/Ha/tahun). Peningkatan produktivitas pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan atau faktor lain yang mendorong hasil panen per hektar.

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit pola swadaya di Provinsi Sulawesi Tengah. Luas lahan, produksi dan produktivitas tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kabupaten Morowali Utara, 2024.

No.	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Mori Utara	1.679,80	1.558,48	0,93
2.	Mori Atas	1.442,50	4.034,80	2,80
3.	Lembo	195,50	453,75	2,32
4.	Lembo Raya	231,00	453,75	1,96
5.	Petasia	33,00	80,50	2,44
6.	Petasia Timur	2.741,00	5.988,75	2,18
7.	Petasia Barat	509,00	1.231,00	2,42
8.	Soyo Jaya	236,50	355,20	1,50
9.	Bungku Utara	727,80	1.715,22	2,36
10.	Mamosalato	444,80	180,18	0,41
Total		8.240,90	16.051,83	
Rata-rata		824,09	1.605,18	1,93

Sumber : Statistik Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, ATAP 2024

Berdasarkan tabel di atas, Rata-rata luas lahan kelapa sawit di Kabupaten Morowali Utara per kecamatan adalah 824,09 hektar. Dari data yang ada, Kecamatan Petasia Timur memiliki luas lahan terluas dengan 2.741,00 Ha, sementara Kecamatan Petasia memiliki luas lahan terkecil dengan 33,00 Ha. Ini menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam alokasi lahan kelapa sawit antar-kecamatan di kabupaten ini.

Rata-rata produksi kelapa sawit di Kabupaten Morowali Utara per kecamatan adalah 1.605,18 ton. Sama seperti luas lahan, produksi juga sangat bervariasi. Kecamatan Petasia Timur mencatatkan produksi tertinggi sebesar 5.988,75 ton, sedangkan Kecamatan Mamosalato memiliki produksi terendah dengan 180,18 ton. Hal ini sejalan dengan perbedaan luas lahan, di mana kecamatan dengan lahan terluas cenderung memiliki produksi terbesar.

Rata-rata produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Morowali Utara adalah 1,93 ton/Ha. Produktivitas adalah indikator penting untuk menunjukkan efisiensi

lahan dalam menghasilkan panen. Perbedaan produktivitas yang mencolok antar kecamatan seperti Mori Atas adalah kecamatan produktivitas tertinggi dibanding Mori Utara dan Mamosalato yang memiliki produktivitas terendah disebabkan karena tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan lebih dari 60% masih dalam fase Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

Pekebun kelapa sawit swadaya di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara sudah menerapkan sebagian dari prinsip dan kriteria ISPO seperti legalitas kebun, sudah memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dan telah terbentuknya organisasi/ kelompok tani pekebun. Masalah yang dihadapi pekebun swadaya yang menjadi tantangan dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi ISPO adalah pengolahan kebun, pengolahan dan pemantauan lingkungan, tingkat pengetahuan dan keterampilan petani swadaya, pengetahuan organisasi petani, pendanaan, dokumen hukum, praktik budidaya yang tepat dan catatan usahatani kebun. Pekebun swadaya juga dihadapkan pada ancaman faktor eksternal antara lain isu lingkungan global, regulasi ISPO yang ketat, regulasi lahan yang *overlapping* dan ketidakstabilan harga CPO/TBS (Nurliza, 2019).

ISPO dimandatkan bagi seluruh perusahaan dan pekebun melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020. Selanjutnya teknis penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perpres Nomor 44 Tahun 2020 mewajibkan semua pelaku usaha Perkebunan kelapa sawit yaitu perusahaan dan pekebun memiliki sertifikasi

ISPO, pekebun diberikan tenggang waktu 5 tahun untuk memenuhi kewajiban tersebut sampai tahun 2025. Pasca itu, kewajiban untuk memenuhi prinsip dan kriteria ISPO tidak bisa lagi dihindari. Namun demikian implementasi ISPO tidak mudah karena tingkat kesiapan (*readiness to implement*) dari petani untuk melakukan sertifikasi masih sangat rendah. Masih banyak hambatan atau kendala seperti akses informasi, tingkat pengetahuan, pembiayaan sertifikasi dan teknologi yang terbatas yang harus diselesaikan ditingkat pekebun untuk mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Capaian Standar ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya (Studi Kasus di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar capaian standar ISPO perkebunan kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Mori Utara?
2. Rancangan strategi apa yang akan digunakan sebagai rekomendasi perbaikan untuk percepatan pemenuhan capaian standar ISPO Perkebunan kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Mori Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar capaian standar ISPO perkebunan kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Mori Utara.
2. Merumuskan rancangan strategi apa yang akan digunakan sebagai rekomendasi perbaikan untuk percepatan pemenuhan capaian standar ISPO Perkebunan kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Mori Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Untuk memperkaya konsep atau teori dalam pelaksanaan perumusan analisis capaian ISPO bagi petani kelapa sawit pola swadaya sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis.

- 1) Bagi Petani Pola Swadaya: sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi petani untuk menerapkan Teknik budidaya kelapa sawit sesuai dengan prinsip dan standar ISPO.
- 2) Bagi Pemerintah: sebagai bahan masukan untuk menghasilkan rancangan strategi yang akan diterapkan pada perkebunan kelapa sawit pola swadaya untuk percepatan sertifikasi ISPO.
- 3) Bagi Penelitian Selanjutnya: sebagai referensi atau bahan masukan dalam pengembangan penelitian sejenis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :

1. Miftah, dkk (2022), judul penelitian “Analisis Capaian ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya Di Kabupaten Rokan Hulu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Rokan Hulu masih belum mampu menerapkan standar perkebunan kelapa sawit terbaik sesuai dengan prinsip dan kriteria yang ada pada sertifikasi ISPO.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Holpu dkk, (2023), judul penelitian “The Implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil on Oil Palm Plantations Smallholders in Kumai District, Central Kalimantan Province”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Rata-rata petani kecil menerapkan kriteria ISPO sebesar 80%, dan (2) Kriteria ISPO yang diterapkan petani kecil

dipengaruhi oleh lamanya pengalaman berusahatani, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota rumah tangga.

3. Sabinus, dkk (2021), dengan judul penelitian “Implementasi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) Pada Petani Kelapa Sawit Swadaya di Kabupaten Sanggau”. Dari hasil penelitian penerapan prinsip ISPO pada petani sawit swadaya di Kecamatan Bonti. Prinsip kelembagaan petani belum diterapkan, sedangkan untuk penerapan kriteria ISPO sebanyak 65,96% belum dijalankan dan hanya 34,04% kriteria ISPO yang sudah dijalankan petani. Belum ada kelompok tani, pendataan dan penyuluhan untuk kelompok tani sawit swadaya di Desa Upe. Namun respons petani terhadap inisiasi pembentukan kelompok tani sudah baik karena ada harapan dapat mempermudah penjualan TBS dan mendapatkan input produksi.
4. Arya, dkk (2019), dengan judul penelitian “Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan parameter legalitas tanah, legalitas benih, dan pengetahuan petani tentang pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa petani sawit skala kecil di tiga lokasi penelitian tidak siap untuk melaksanakan sertifikasi ISPO. Analisis GAP pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beda yang sangat signifikan antara harapan dengan kenyataan untuk aspek-aspek yang menjadi parameter ISPO. Struktur nafkah rumah tangga petani kelapa sawit swadaya muncul dalam dua tipe yakni rumahtangga dengan kontribusi kelapa sawit yang dominan dan struktur nafkah yang beragam (kelapa sawit tidak

dominan).Sertifikasi ISPO beresiko terhadap rumahtangga yang memiliki struktur nafkah yang beragam karena berpotensi membebani sumber nafkah non kelapa sawit.Dengan demikian, resiko ekspansi lahan perkebunan kelapa terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup, tetap akan menjadi tantangan besar ke depan.

5. Fuad, dkk (2024), judul penelitian “Persepsi Pekebun Swadaya Terhadap Penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Di Kabupaten Muaro Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekebun swadaya memiliki pengetahuan yang rendah terhadap penerapan ISPO; Walaupun pengetahuan pekebun swadaya tentang ISPO relatif rendah, tetapi persepsinya positif terhadap prinsip dan kriteria ISPO, baik pada aspek legalitas dan pengelolaan kebun, organisasi pekebun dan pengelolaan kebun milik pekebun swadaya, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Adanya persepsi yang positif ini, menjadi indikasi yang baik bagi penerapan ISPO pada perkebunan sawit swadaya di masa yang akan datang.
6. Rosnita, dkk (2022), dengan judul penelitian “Persepsi Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Dalam Penerapan Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) Di Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kelapa sawit masih belum memenuhi prinsip-prinsip ISPO terutama pada prinsip peningkatan usaha berkelanjutan dan prinsip pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Petani memiliki persepsi bahwa mereka masih kurang mampu menerapkan keempat prinsip ISPO terutama dalam

peningkatan usaha berkelanjutan dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful dkk (2023), dengan judul penelitian “Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi prioritas untuk percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya adalah dengan (i) percepatan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), (ii) penguatan kelembagaan penyelenggara ISPO mulai dari pusat hingga ke kabupaten sentra kelapa sawit dan (iii) penyediaan dukungan tenaga pendamping. Pelaksanaan PSR dan kelembagaan penyelenggara ISPO yang kuat serta didukung pendamping lapangan akan dapat menguatkan kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya dan memberdayakan para pihak (Perkebunan Besar Swasta/Perkebunan Besar Negara) untuk lebih berpartisipasi dalam pendampingan pekebun swadaya pada proses sertifikasi ISPO.

2.2 Kajian Pustaka

1. Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Guna menjamin praktik keberlanjutan perkebunan sawit di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai landasan sertifikasi produk sawit berkelanjutan (Cici dkk, 2024).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia

pada pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa: (3) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO (Perpres Nomor 44, 2020). Sebagai respon, pemerintah Indonesia menetapkan standar *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* untuk memastikan keberlanjutan pengembangan industri kelapa sawit dan menyangkal kampanye negatif yang menyatakan bahwa pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia berdampak buruk terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup (Rizka dkk, 2023).

Sertifikasi ISPO dapat berdampak pada tingkat produksi, harga TBS, penggunaan faktor-faktor produksi dan tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh petani ISPO dan tidak ISPO. Tingkat produksi, harga TBS dan penggunaan faktor-faktor produksi yang dihasilkan oleh petani ISPO dan tidak ISPO memiliki perbedaan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan kelapa sawit sehingga dapat berdampak pada tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh petani. Pendapatan petani menunjukkan tingkat penerimaan dari usahatani yang tenaga kerjanya berasal dari keluarganya sendiri (Saragih dkk, dalam Yanti dkk, 2022).

Tujuan dari sertifikasi sudah tertuang di dalam Perpres Nomor 44 tahun 2020. Sertifikasi dilakukan bertujuan untuk :

1. Memastikan serta meningkatkan pengelolaan, pengembangan perkebunan sawit sesuai prinsip dan kriteria yang telah ditentukan.
2. Meningkatkan keberterimaan dan juga daya saing atas hasil perkebunan kelapa sawit, baik di pasar dalam negeri maupun internasional.
3. Meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

Lembaga Sertifikasi adalah badan independen (pihak ketiga) yang dibentuk untuk menilai atau mengaudit apakah sebuah perusahaan perkebunan sudah memenuhi prinsip dan kriteria keberlanjutan. Untuk menjamin legalitas dan akuntabilitasnya dalam menjalankan pekerjaan itu, Lembaga Sertifikasi mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan harus mendapat pengakuan oleh Komisi ISPO. Semua biaya audit menjadi tanggungan perusahaan. Terdapat dua kali proses audit untuk memperoleh sertifikasi ISPO. Audit pertama melingkupi verifikasi dokumen-dokumen seperti IUP, HGU dan AMDAL, penentuan sampel perkebunan, dan calon narasumber untuk kebutuhan data. Audit kedua berupa pengecekan semua dokumen di lapangan dan kepatuhan terhadap prinsip dan kriteria keberlanjutan yang ditetapkan oleh ISPO, kompetensi pegawai perkebunan, dan wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan. Audit pertama dan kedua harus mendapatkan pernyataan kelulusan (*approval*) dari Komisi ISPO. Khusus untuk audit kedua, keputusan kelulusan harus didahului dengan keluarnya rekomendasi kelulusan dari Tim Penilai. Jika hasil dari audit positif,

perusahaan mendapat sertifikat ISPO yang ditandatangani oleh Lembaga Sertifikasi dan Direktur Jenderal Perkebunan sebagai perwakilan dari Komisi ISPO. Sertifikat yang sudah diserahkan kepada perusahaan akan berlaku selama lima tahun. Lembaga Sertifikasi setahun sekali wajib melakukan *surveillance* (pengecekan) terhadap perusahaan yang sudah bersertifikat dengan biaya ditanggung perusahaan (Bakhtiar dkk, 2018).

Berdasarkan Permentan No. 11/2015, secara umum prinsip sertifikasi ISPO adalah sebagai berikut :

1. Legalitas usaha Perkebunan
2. Manajemen Perkebunan
3. Pelindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut.
4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
5. Tanggungjawab terhadap pekerja
6. Tanggungjawab sosial dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO untuk pekebun adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundangan
2. Penerapan praktek perkebunan yang baik
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keakaragaman hayati
4. Penerapan transparansi
5. Peningkatan usaha berkelanjutan

Perpres No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terbit pada bulan Maret 2020, menggantikan peraturan ISPO sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 11/2015. Apabila dibandingkan dengan peraturan ISPO sebelumnya, perubahan utama yang dibuat dalam Perpres ISPO ini adalah penambahan prinsip baru tentang transparansi, dan menghapus prinsip tentang perlindungan hutan primer dan lahan gambut. Penghapusan prinsip perlindungan hutan primer dan lahan gambut dan menggantikannya dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati menimbulkan tanda tanya besar mengenai keberpihakan Perpres 44/2020 terhadap kebijakan minyak kelapa sawit bebas deforestasi (*deforestation-free palm oil*).

Pengalaman membuktikan bahwa selama ini prinsip perlindungan hutan primer dan lahan gambut yang diterapkan dalam ISPO yang lama masih belum mampu menghentikan deforestasi, apalagi jika prinsip tersebut dihilangkan maka dapat dipastikan deforestasi akibat ekspansi kebun kelapa sawit akan terus meningkat. Bahkan kebijakan moratorium pemanfaatan hutan primer dan lahan gambut yang diterapkan sejak tahun 2011 dan ditambah dengan kebijakan moratorium perizinan kebun sawit tahun 2018, ternyata belum mampu juga menghentikan ekspansi kebun sawit. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari bertambahnya kebun kelapa sawit seluas 3,57 juta ha atau tumbuh rata-rata 7,89% selama periode 2014-2018 (Purwanto, 2020).

Penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO untuk perkebunan

adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Indikator Prinsip dan Kriteria Standar ISPO bagi Pekebun Swadaya

NO.	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR
1.	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN	1.1 Legalitas dan Pengelolaan Pekebun	Mempunyai sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.
		1.2 Lokasi Pekebun	Lahan pekebun mengacu kepada penetapan tata ruang.
		1.3 Sengketa Lahan dan Kompensasi serta Sengketa Lainnya	Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya : 1. Mempunyai dokumen progress musyawarah untuk penyelesaian sengketa dan tersedia peta lokasi sengketa lahan. 2. Mempunyai Salinan perjanjian yang telah disepakati.
		1.4 Legalitas Usaha Perkebunan	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk, Budidaya (STD-B).
		1.5 Kewajiban terkait Izin Lingkungan	1. Memiliki izin lingkungan sesuai SPPL. 2. Memiliki catatan pelaksanaan penerapan SPPL.
2.	PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK	2.1 Organisasi Kelembagaan Pekebun Pekebun dapat bergabung dalam kelompok tani atau koperasi sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggotanya.	1. Pekebun memiliki kelembagaan dalam bentuk kelompok tani atau koperasi. 2. Mempunyai dokumen pembentukan kelompok tani dan/atau koperasi yang diketahui oleh pejabat berwenang.

		2.2 Pengelolaan Pekebun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dokumen rencana kegiatan operasional pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi. 2. Tersedia laporan kegiatan pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi.
		2.3 Penerapan Teknis Budidaya dan Pengangkutan Kelapa Sawit.	
		2.3.1 Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.	Memiliki dan melaksanakan SOP dan instruksi kerja cara pembukaan lahan tanpa bakar .
		2.3.2 Perbenihan Untuk mendukung produktivitas tanaman dari Pekebun, benih yang digunakan harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan benih tanaman berasal dari produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari instansi yang berwenang dan diakui oleh Kementerian Pertanian. 2. Mempunyai catatan asal benih.
		2.3.3 Penanaman pada Lahan Mineral Pekebun swadaya dalam melakukan penanaman harus sesuai baku teknis dalam mendukung produktivitas tanaman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dan melaksanakan SOP penanaman yang sesuai <i>Good Agriculture Practises</i> (GAP). 2. Memiliki catatan pelaksanaan penanaman.
		2.3.4 Penanaman pada Lahan Gambut	Memiliki catatan untuk penanaman pada lahan gambut yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

		Penanaman kelapa sawit di kebun swadaya di lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.	
		2.3.5 Pemeliharaan Tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman. 2. Memiliki catatan mengenai pemupukan tanaman dan pelaksanaan pemeliharaan tanaman
		2.3.6 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dan melaksanakan Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)/ Integrated Pest Management (IPM). 2. Mempunyai sarana pengendalian OPT sesuai petunjuk teknis serta tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih.
		2.3.7 Pemanenan Pekebun, kelompok tani, koperasi memastikan bahwa panen dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki acuan teknis untuk buah yang dipanen 20% buah matang panen dan dilakukan pada waktu yang tepat. 2. Memiliki rekaman/ catatan pelaksanaan pemanenan.
		2.3.8 Pengangkutan Buah Pekebun memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pembeli untuk	Memiliki dan melaksanakan petunjuk teknis pengangkutan TBS.

		menghindari kerusakan buah.	
3.	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	<p>3.1 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</p> <p>Pekebun swadaya harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kebunnya di lingkungannya masing-masing.</p>	<p>Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait terdekat sesuai Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.</p>
		<p>3.2 Pelestarian Keanekaragaman Hayati (biodiversity).</p> <p>Pekebun swadaya harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan di sekitar kebun dan sesudah dimulainya usaha perkebunan. 2. Memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.
4.	PENERAPAN TRANSPARANSI	<p>4.1 Penjualan dan Kesepakatan Harga TBS.</p> <p>TBS dijual kepada perusahaan perkebunan dengan harga yang mengacu pada penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki informasi harga TBS berdasarkan penetapan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS untuk setiap tujuan penjualan. 2. Tersedia catatan harga TBS dan realisasi pembelian oleh perusahaan/ pabrik dan tersedia sumber informasi harga untuk penetapan harga pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi secara rutin.
		<p>4.2 Penyediaan Data & Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pelayanan informasi. 2. Mempunyai dokumen pemberian informasi kepada pemangku

		Penyediaan data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan.	kepentingan sesuai peraturan yang berlaku. 3. Mempunyai dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.
5.	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN	Meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.	Memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan.

Penerapan sertifikasi ISPO secara wajib (mandatory) bagi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit merupakan satu langkah yang patut diapresiasi. Kebijakan ini merupakan langkah konkrit Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Pemerintah berharap melalui kebijakan ini produk kelapa sawit Indonesia akan lebih diterima dan berdaya saing di pasar global. Lebih lanjut dengan semakin baiknya pengelolaan perkebunan kelapa sawit maka diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Namun demikian, implementasi ISPO tidak mudah karena tingkat kesiapan (readiness to implement) dari kelompok pekebun untuk melakukan sertifikasi masih sangat rendah. Masih banyak hambatan atau kendala yang harus diselesaikan di tingkat pekebun untuk mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan (Purwanto, 2020).

2. Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya

Perkebunan kelapa sawit swadaya adalah kebun kelapa sawit rakyat yang tidak berafiliasi dengan lembaga manapun, petani menjual sendiri hasil panen mereka ke pabrik lokal, baik secara langsung atau melalui pedagang. Petani kelapa sawit swadaya dihadapkan pada berbagai permasalahan, di antaranya keterbatasan akses terhadap sumber informasi teknologi, pembiayaan, pasar, dan informasi penting lainnya yang dapat menghambat kemajuan petani kelapa sawit swadaya. Perkebunan kelapa sawit swadaya juga tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, bahkan belum terdata dengan baik di instansi pemerintah terkait. Tanpa dukungan pemerintah atau perusahaan besar, perkebunan kelapa sawit swadaya akan menghadapi permasalahan yang lebih serius seiring makin kuatnya tekanan dari pihak pembeli yang mensyaratkan banyak hal seperti standar Sertifikasi ISPO (Henny dkk, 2021).

Perkebunan kelapa sawit swadaya merupakan bagian dari rantai pasok agribisnis kelapa sawit yang perlahan dituntut untuk menerapkan aspek keberlanjutan. Sertifikasi keberlanjutan seakan menjadi kewajiban untuk memasuki pasar sementara posisi perkebunan yang tidak memiliki kemampuan manajerial menjadi keterbatasan bagi petani. Pemenuhan aspek keberlanjutan terhadap perkebunan kelapa sawit rakyat bukan hal yang mudah karena motif ekonomi masih mendominasi dalam praktik budidaya perkebunan kelapa sawit rakyat namun hal ini tidak menjadi alasan bagi pihak pengambil kebijakan untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan (Saragih dkk, 2020). Perkebunan kelapa sawit (milik rakyat, swasta, dan negara) selain

berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi juga berdampak negatif (Vicki dkk, 2021).

Perkebunan kelapa sawit rakyat merupakan bagian dari rantai pasok agribisnis kelapa sawit yang perlahan dituntut untuk menerapkan aspek keberlanjutan. Sertifikasi keberlanjutan seakan menjadi kewajiban untuk memasuki pasar sementara posisi perkebunan yang tidak memiliki kemampuan manajerial menjadi keterbatasan bagi petani. Pemenuhan aspek keberlanjutan terhadap perkebunan kelapa sawit rakyat bukan hal yang mudah karena motif ekonomi masih mendominasi dalam praktik budidaya perkebunan kelapa sawit rakyat (Saragih dkk, 2020).

3. Tantangan Sertifikasi ISPO pada Petani Swadaya

Menurut *European Forest Institute* (2024), meskipun sertifikasi ISPO telah diwajibkan bagi perusahaan perkebunan sejak tahun 2011, banyak yang belum tersertifikasi. Peraturan Presiden tahun 2020 mewajibkan semua petani kecil harus bersertifikat ISPO dalam waktu lima tahun - pada November 2025. Implementasi sertifikasi ISPO terbatas karena beberapa alasan termasuk manfaat yang terbatas, kapasitas teknis dan keuangan yang tidak memadai, kurangnya pengakuan pasar, dan tantangan dalam memenuhi persyaratan ISPO. Bagi petani kecil, hal ini diperparah oleh hambatan-hambatan lain yang berikut:

1. Legalitas kepemilikan lahan: Legalitas lahan merupakan persyaratan dasar untuk sertifikasi ISPO. Namun, banyak perkebunan kelapa sawit petani kecil terletak di dalam kawasan hutan yang ditetapkan secara nasional,

termasuk di kawasan konservasi dan dilindungi. Pada kasus tertentu, kelompok adat atau asli menggarap tanah yang secara historis mereka huni tetapi tidak memiliki hak hukum. Bahkan ketika petani kecil memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, perselisihan dapat timbul akibat tumpang tindih izin dan konflik dengan rencana spasial pemerintah.

2. Proses Pengajuan Sertifikat Pendaftaran Budidaya (STD-B) yang membebani petani kecil: STD-B penting bagi petani kecil untuk memperoleh dukungan pemerintah dan mengajukan sertifikasi ISPO, yang berfungsi sebagai dasar pengakuan hukum. Namun, untuk memperoleh STD-B memerlukan bukti kepemilikan atau hak atas lahan, yang seringkali tidak dimiliki oleh petani kecil. Tantangan lain untuk pendaftaran petani kecil adalah pemahaman petani yang masih rendah, proses yang rumit, dan kurangnya dukungan keuangan dan teknis.
3. Persyaratan Kelembagaan yang memberatkan: Sertifikasi ISPO mewajibkan petani kecil untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok petani kecil. Namun, menurut Hadi et. al. (2022), 80% petani kecil mandiri tidak terafiliasi dengan kelompok manapun. Mendirikan dan memformalkan organisasi petani untuk sertifikasi ISPO membutuhkan dukungan keuangan yang substansial. Selain itu, terdapat keterbatasan yang signifikan terkait sumber daya manusia untuk pelatihan dan pengawasan di sektor perkebunan pada tingkat regional.
4. Persyaratan dokumentasi dan audit yang memberatkan: Sertifikasi ISPO melibatkan regulasi kerangka kerja dan pengembangan berbagai dokumen

dan Prosedur Operasi Standar (SOP), termasuk Sertifikat Tanda Daftar Budidaya (STDB), sertifikat benih, Surat Pernyataan Penanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan dokumentasi implementasi Praktik Pertanian yang Baik (GAP). Untuk memenuhi persyaratan ini dan menjalani berbagai tahap audit, petani kecil membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar.

5. Biaya sertifikasi tinggi: Studi oleh Wibobo dkk. (2023) memperkirakan bahwa kelompok petani kecil membutuhkan sekitar IDR 115 juta (EUR 6500) untuk mempersiapkan sertifikasi ISPO, termasuk mendirikan kelompok petani kecil, pemetaan lahan pertanian, dan pengembangan SOP. Biaya sertifikasi untuk kelompok petani kecil bisa mencapai sekitar IDR 250 juta (EUR 14.100). Salam (2022) menunjukkan bahwa biaya sertifikasi ISPO sekitar IDR 0,75-1,2 juta (EUR 42-68) per hektar dan memerlukan verifikasi tahunan oleh Badan Sertifikasi, menimbulkan biaya tambahan sekitar IDR 0,4-0,5 juta (EUR 23-28) per hektar.

4. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan ISPO pada Petani Swadaya

Menurut Azizah (2020) faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan ISPO pada petani swadaya adalah :

1. Pengetahuan dan Kesadaran: Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pekebun swadaya tentang praktik berkelanjutan cukup tinggi, namun tidak selalu diikuti dokumentasi yang baik.
2. Akses Sumber Daya: Ketersediaan informasi, pelatihan, dan akses terhadap sertifikasi dapat memengaruhi capaian ISPO.

3. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait: Dukungan dari pemerintah, seperti penyediaan informasi dan pendampingan, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi petani kecil.

5. Perumusan Strategi

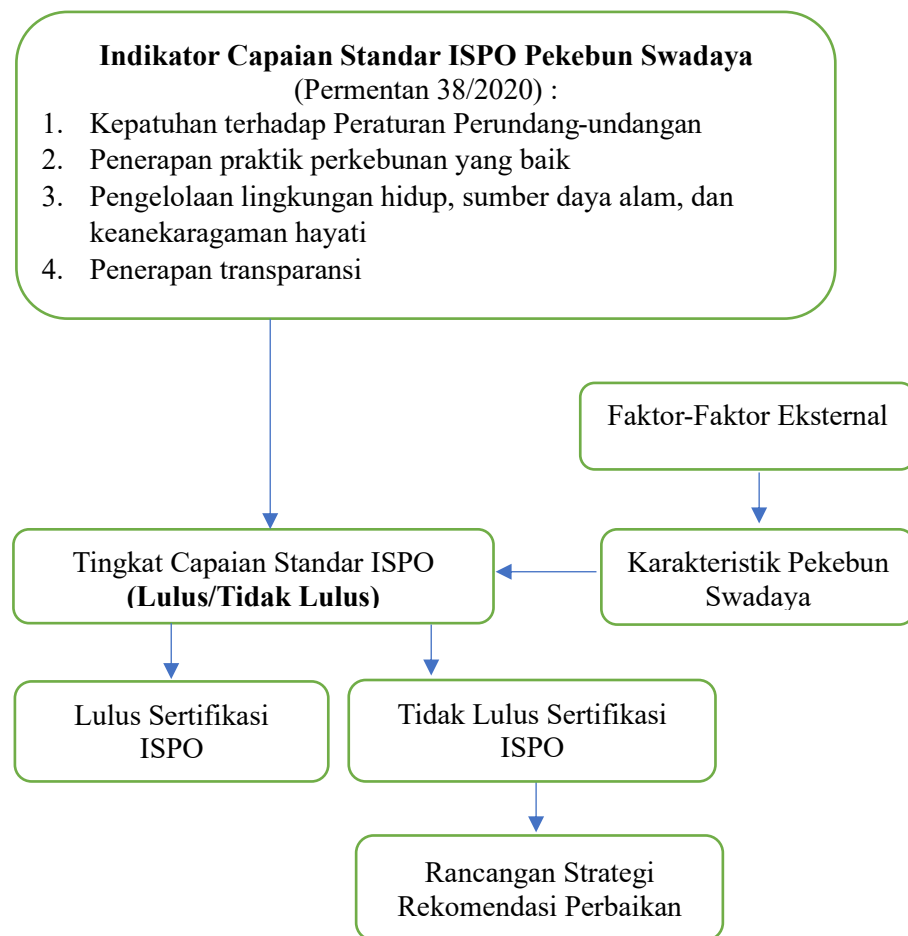
Strategi-strategi yang akan dirancang dan dibuat oleh pekebun kelapa sawit pola swadaya dalam pencapaian standar ISPO tersebut dapat digambarkan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths-Weakness-Opportunities-Threats*). Analisis SWOT adalah suatu cara mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan logika dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Strategi tersebut dapat dilihat dalam suatu matriks analisis SWOT pada Tabel (Mifta dkk, 2022).

Tabel 5. Matriks SWOT

Faktor Eksternal / Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strengths/S</i>) Menentukan faktor-faktor yang merupakan kekuatan internal	Kelemahan (<i>Weaknesses /W</i>) Menentukan faktor-faktor yang menjadi kelemahan internal
Peluang (<i>Opportunities/O</i>) Menentukan faktor-faktor yang merupakan peluang	Strategi S-O Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi W-O Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
Ancaman (<i>Threats/T</i>) Menentukan faktor-faktor yang menjadi ancaman	Strategi S-T Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.	Strategi W-T Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian (Addini dkk, 2023). Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini tersaji pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Capaian ISPO Pekebun Swadaya

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Assyakurrohim dkk, 2023).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan Kecamatan Mori Utara merupakan satu-satunya kecamatan sentra Perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Morowali Utara dimana petani kelapa sawit di kecamatan tersebut telah memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). STDB merupakan salah satu syarat penting untuk pencapaian standar sertifikasi ISPO. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai bagian dari metode pengumpulan data, yang melibatkan penyebaran daftar pertanyaan atau komentar tertulis kepada responden (Sugiyono, 2017). Ada tiga tahap teknik pengumpulan data, yaitu: Pra observasi dan pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui data terkait lokasi dan jumlah petani swadaya di Kabupaten Morowali Utara. Sumber

data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini bersumber dari wawancara melalui kuisisioner yang dijawab oleh responden dan data sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, Publikasi Pemerintah, Laporan Statistik Perkebunan, Jurnal dan Buku.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama, yang menjadi dasar dalam pengumpulan data penelitian. Definisi ini menekankan pentingnya memperhatikan tiga komponen utama dalam penelitian: subjek, objek, dan lokasi penelitian (Putu, 2024). Pada penelitian ini, populasi dipilih pekebun swadaya kelapa sawit yang telah memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) di Kecamatan Mori Utara, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah Populasi Petani Kelapa Sawit di Lokasi Penelitian

No.	Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Populasi (orang)
1.	Peleru	Mori Utara	160.00	40
2.	Tabarano	Mori Utara	181.41	95
3.	Lembontonara	Mori Utara	370.00	126
Jumlah			711.41	261

Sumber : DPPD Kab. Morowali Utara 2025

Berdasarkan total populasi selanjutnya perlu dilakukan pengukuran untuk memperoleh jumlah sampel penelitian. Berdasarkan data populasi diatas, penentuan ukuran sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi yang dirumuskan sebagai berikut (Subhaktiyasa, 2024):

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi 261 petani dari ketiga desa

e = Tingkat toleransi kesalahan 10% (0,1)

maka jumlah sampel:

$$n = \frac{261}{1 + 261(0,1)^2}$$

$$n = \frac{261}{1 + 261(0,01)}$$

$$n = \frac{261}{1 + 2,61}$$

$$n = \frac{261}{3,61}$$

$$n = 72,30 = 72 \text{ petani}$$

Jadi, ukuran sampel pada penelitian ini adalah 72 petani.

Setelah mendapatkan ukuran sampel total (n), selanjutnya dilakukan penentuan sampel secara proporsional ke setiap desa berdasarkan jumlah populasinya. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap populasi dari masing-masing desa terwakili dalam sampel sesuai dengan proporsi aslinya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan rumus (Binus University, 2022):

$$Proportional = \frac{\sum \text{Populasi}}{\sum \text{Total Populasi}} \times \text{Sampel}$$

Maka jumlah sampel masing-masing desa adalah:

1. Desa Peleru = 40 petani

$$Proportional = \frac{40}{261} \times 72 = 11,03 = 11 \text{ Petani}$$

2. Desa Tabarano = 95 petani

$$\textit{Proportional} = \frac{95}{261} \times 72 = 26,20 = 26 \text{ Petani}$$

3. Desa Lembontonara = 126 petani

$$\textit{Proportional} = \frac{126}{261} \times 72 = 34,75 = 35 \text{ Petani}$$

Total sampel akhir: $11+26+35 = 72$ petani

Hasil pembagian sampel ini sesuai dengan total ukuran sampel yang dihitung dengan rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel yang terdiri dari 11 petani dari Desa Peleru, 26 dari Desa Tabarano dan 35 dari Desa Lembontonara dengan total 72 petani kelapa sawit swadaya yang telah memiliki STDB.

3.5 Metode Analisis

Tujuan pertama dalam penelitian ini yaitu mengetahui capaian standar sertifikasi ISPO oleh pekebun swadaya menggunakan metode analisis deskriptif. Studi ini menggunakan indikator standar ISPO untuk mengukur pencapaian dari pekebun untuk mendapatkan sertifikasi. Analisis dilakukan dengan mengamati praktek-praktek yang diterapkan pekebun kelapa sawit dan kuesioner indikator ISPO pekebun kelapa sawit swadaya dengan jawaban ya atau tidak. Selanjutnya diperdalam tingkat penerapan. Jika jawaban responden iya maka skala dihitung satu (1), sebaliknya jika jawaban dari responden tidak atau tidak dapat memperlihatkan bukti telah menerapkan standar maka skala dihitung nol (0).

Penentuan nilai kesesuaian dengan menjumlahkan indikator yang sesuai dengan ketentuan ISPO pada masing-masing prinsip dalam bentuk persen. Hasil tersebut merupakan nilai pencapaian standar ISPO bagi pekebun swadaya diwilayah penelitian. Penentuan bobot dalam setiap prinsip ISPO didasarkan pada

proporsi jumlah indikator standar dalam prinsip tersebut dibandingkan dengan total keseluruhan indikator dalam standar ISPO. Penentuan bobot dalam setiap prinsip dilakukan dengan rumus (Anwar dkk, 2016):

$$Bp = \left(\frac{Np}{N} \right) \times 100\%$$

Dimana:

Bp = Nilai bobot masing-masing prinsip

Np = Jumlah indikator dalam masing-masing prinsip

N = Jumlah keseluruhan indikator dalam standar ISPO

Setelah bobot setiap prinsip ditentukan, selanjutnya adalah mengukur tingkat capaian atau persentase pemenuhan dari setiap prinsip dan kriteria ISPO. Pengukuran ini biasanya dilakukan dengan menilai setiap indikator berdasarkan verifikasi lapangan (dokumen, observasi, wawancara). Tingkat capaian untuk setiap prinsip kemudian dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Anwar dkk, 2016):

$$Pp = \left(\frac{nr}{Bp} \right) \times 100\%$$

Dimana:

Pp = Nilai capaian prinsip (dalam persentase)

Nr = Nilai rerata capaian prinsip (berdasarkan penilaian indikator di prinsip tersebut)

Bp = Nilai bobot setiap prinsip (yang telah dihitung sebelumnya)

Rata-rata persentase pemenuhan standar ISPO ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7. Kriteria Pemenuhan Standar Capaian ISPO

No.	Interval (%)	Kriteria
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Tujuan kedua penelitian ini yaitu merumuskan strategi yang akan digunakan untuk percepatan pemenuhan capaian standar ISPO Perkebunan kelapa sawit swadaya. Analisis EFAS (*External Factors Analysis Summary*) dan IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) umumnya digunakan sebagai bagian dari analisis SWOT untuk merumuskan strategi, termasuk strategi percepatan pencapaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun kelapa sawit swadaya.

1. Analisis IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*)

Analisis IFAS merangkum kondisi internal pekebun swadaya terkait ISPO, mengidentifikasi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) yang dapat memengaruhi pencapaian sertifikasi.

- 1) Organisasi Pekebun/
Kelompok Tani Keberadaan Kelompok Tani yang menjadi syarat mutlak untuk sertifikasi ISPO kelompok, memungkinkan koordinasi dan pendampingan.
- 2) Legalitas Kepemilikan
Lahan Mayoritas pekebun memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah (SHM, Girik, dll.) atau bukti penggarapan yang jelas dan pekebun telah memiliki STD-B.
- 3) Penggunaan Bibit Unggul Semua pekebun diwilayah penelitian telah menggunakan bibit unggul sesuai rekomendasi Ditjenbun

- | | |
|--|--|
| 4) Motivasi Ekonomi | Harapan akan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik (harga premium) atau akses pasar yang lebih luas pasca-sertifikasi ISPO. |
| 5) Pengalaman Usaha Tani | Pekebun yang lebih berpengalaman cenderung lebih sadar manfaat ISPO dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengimplementasikannya. |
| 6) Dukungan PBS/PBN dalam sertifikasi ISPO | Potensi kolaborasi dengan PBS/PBN yang membutuhkan pasokan bersertifikat untuk memenuhi komitmen keberlanjutan mereka. |
| 7) Pengetahuan dan Keterampilan | Kurangnya pengetahuan mengenai perkembangan terkini di bidang persawitan, budidaya kelapa sawit yang baik (GAP), dan persyaratan spesifik ISPO (prinsip, kriteria, dan prosedur ISPO). |
| 8) Kapasitas Organisasi Lemah | Kelompok tani/koperasi seringkali belum optimal dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan kontrol rantai pasok. |
| 9) Rendahnya Penerapan GAP | Praktik budidaya (penggunaan benih, pemupukan, pengendalian hama) masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar teknis ISPO. |
| 10) Keterbatasan Modal & Biaya Sertifikasi | Biaya yang diperlukan untuk persiapan (pemetaan kebun, SOP) dan audit sertifikasi ISPO, yang relatif tinggi bagi pekebun swadaya, menjadi hambatan finansial. |
| 11) Pencatatan dan Administrasi Kebun | Sistem pencatatan dan administrasi kebun (penggunaan pupuk, pestisida, hasil panen, dll.) yang masih lemah atau tidak terstruktur. |

2. Analisis EFAS (*External Factors Analysis Summary*)

Analisis EFAS merangkum kondisi eksternal yang dihadapi pekebun swadaya, mengidentifikasi Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) terkait pencapaian sertifikasi ISPO.

- 1) Sifat Mandatori ISPO Adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 yang mewajibkan ISPO bagi semua pelaku usaha, termasuk pekebun swadaya (dengan batas waktu tertentu, misalnya 2025), menciptakan urgensi dan dukungan regulasi.
- 2) Dukungan Pemerintah/ Lembaga Terkait Adanya dukungan program pemerintah seperti sosialisasi ISPO, bimbingan teknis, dan fasilitasi dari Komisi ISPO atau Lembaga Sertifikasi (LS).
- 3) Tuntutan Pasar Global Berkelanjutan Peningkatan permintaan minyak sawit berkelanjutan (*sustainable palm oil*) di pasar internasional, yang menjadikan ISPO sebagai alat daya saing dan penerimaan produk di pasar.
- 4) Perkembangan Teknologi Kemudahan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi untuk penyuluhan berbasis digital (misalnya, aplikasi SawitKita) dan informasi pasar.
- 5) Insentif Harga Potensi perbedaan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih tinggi untuk sawit bersertifikat ISPO di masa depan
- 6) Isu Lingkungan dan Kampanye Negatif Kampanye negatif dan tuntutan negara konsumen (misalnya, Uni Eropa) terkait pengelolaan sawit dan isu lingkungan (*deforestasi, emisi GRK*).

- | | |
|----------------------------------|---|
| 7) Regulasi ISPO yang Ketat | Kebijakan yang mengharuskan sertifikasi ISPO sebagai syarat ekspor atau penjualan, yang berisiko memarginalkan pekebun yang belum tersertifikasi. |
| 8) Ketidakstabilan Harga CPO/TBS | Fluktuasi harga CPO/TBS yang dapat memengaruhi kemampuan finansial pekebun untuk berinvestasi dalam pemenuhan standar ISPO. |

Hasil EFAS dan IFAS ini menjadi input untuk analisis dan disajikan kedalam matriks SWOT (*Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats*), yang kemudian menghasilkan strategi prioritas percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun kelapa sawit pola swadaya.

Berikut adalah langkah-langkah sistematis untuk menyusun analisis IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factor Analysis Summary*) dalam kerangka Analisis SWOT (Rinawati dan Purnama, 2018):

1. Susunlah 5-10 kekuatan dan kelemahan untuk IFAS serta peluang dan ancaman untuk EFAS.
2. Berikan bobot mulai dari 0,0 (Tidak Penting) hingga 1.0 (Sangat Penting) pada masing-masing faktor.
3. Hitung *rating* pada masing-masing faktor dengan skala 1 (*poor*) hingga 4 (*outstanding*) berdasarkan pengaruh faktor terhadap kondisi organisasi atau perusahaan.
4. Kalikan bobot dengan *rating* untuk memperoleh faktor pembobotan, sehingga menghasilkan skor pembobotan pada masing-masing factor yang nilainya bervariasi mulai dari 1.0 (*poor*) hingga 4.0 (*outstanding*).

5. Jumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan yang nantinya nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor strategis eksternalnya.
6. Gunakan total skor dari IFAS dan EFAS tersebut untuk menentukan posisi organisasi dalam Diagram Kartesius SWOT atau menyusun strategi spesifik (SO, ST, WO, WT) pada Matriks SWOT.

Penggunaan analisis SWOT sangat membantu untuk menyusun strategi dengan mengkombinasi aspek kekuatan, kelemahan didalam faktor internal dengan aspek peluang dan ancaman didalam faktor eksternal. Matriks ini menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis yaitu: 1) Strategi SO, 2) Strategi ST, 3) Strategi WO dan 4) Strategi WT. Untuk memperoleh alternatif hambatan-hambatan yang terjadi di perkebunan swadaya dan strategi yang menjadi prioritas untuk menghadapi sertifikasi ISPO, maka setiap komponen-komponen faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang ada diberi nilai berdasarkan pengaruh faktor yang terjadi kondisi pekebun kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penentuan cara mengukur suatu variabel. Dalam konteks analisis capaian sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) untuk perkebunan kelapa sawit swadaya, variabel-variabel yang dianalisis harus didefinisikan secara jelas agar dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa praktik perkebunan kelapa sawit rakyat

memenuhi standar keberlanjutan, berkontribusi pada pelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berikut adalah definisi operasional untuk variabel-variabel kunci yang digunakan dalam analisis capaian sertifikasi ISPO perkebunan kelapa sawit pola swadaya :

1. Tingkat Capaian Sertifikasi ISPO: Mengukur sejauh mana perkebunan kelapa sawit swadaya telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Ini mencakup evaluasi terhadap dokumen legalitas lahan, penerapan praktik budidaya, dan kepatuhan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
2. Karakteristik Perkebunan Pola Swadaya: Mengukur kondisi internal perkebunan yang memengaruhi capaian sertifikasi. Indikatornya meliputi luas lahan, usia tanaman, status kepemilikan lahan, serta pengetahuan dan pemahaman petani terkait ISPO.
3. Analisis IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*): merangkum kondisi internal pekebun swadaya terkait ISPO, mengidentifikasi Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) yang dapat memengaruhi pencapaian sertifikasi.
4. Analisis EFAS (*External Factors Analysis Summary*): merangkum kondisi eksternal yang dihadapi pekebun swadaya, mengidentifikasi Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) terkait pencapaian sertifikasi ISPO.
5. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*): mengevaluasi posisi strategis usaha dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Teknik ini memonitor faktor internal dan eksternal untuk memaksimalkan potensi, meminimalkan kelemahan,

memanfaatkan peluang, dan menghindari ancaman guna merumuskan strategi pengembangan yang efektif.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Responden berdasarkan umur diwilayah penelitian Kecamatan Mori Utara disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Responden Pekebun Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Mori Utara berdasarkan Umur

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	20 - 64	68	94
2.	> 64	4	6
	Jumlah	72	100

Sumber : Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 8, umur responden didaerah penelitian Kecamatan Mori Utara menunjukkan jumlah petani dengan rentang usia produktif 20-64 tahun 94% dan usia lanjut > 64 tahun dengan persentase 6%.

Mayoritas pekebun kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Mori Utara atau persentase 94% berada dalam rentang produktif (20–64 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya minat dari generasi muda untuk terjun ke budidaya kelapa sawit swadaya yang dikelola oleh tenaga kerja yang secara fisik masih kuat dan memiliki kapasitas kerja yang tinggi. Ini adalah tanda positif bagi keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Pekebun ini cenderung lebih terbuka terhadap inovasi teknologi dibandingkan kelompok usia lanjut.

Kelompok usia lanjut <64 tahun persentase 6%, lebih memahami kondisi kebunnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Novia (2011) yang menyatakan bahwa

petani yang usianya lebih tua biasanya memiliki kelebihan dalam mengenali kondisi lahan usaha tani namun pemahaman yang relatif kurang.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan diwilayah penelitian Kecamatan Mori Utara disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Responden Pekebun Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Mori Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SD	15	21
2.	SMP	21	29
3.	SMA	29	40
4.	Diploma/Sarjana	7	10
	Jumlah	72	100

Sumber : Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 9, responden diwilayah penelitian Kecamatan Mori Utara pendidikan Sekolah Dasar berjumlah 21%, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama 29%, Sekolah Menengah Atas 40% dan responden dengan tingkat pendidikan Diploma/Sarjana 10%.

Berdasarkan data tersebut, tingkat pendidikan pekebun di Kecamatan Mori Utara terbanyak pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas yakni 40%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pekebun memiliki kemampuan kognitif yang cukup untuk menerima informasi teknis dan mengadopsi inovasi baru dalam budidaya kelapa sawit. Responden dengan latar belakang pendidikan SMA dan Diploma/Sarjana sejumlah 50% umumnya memiliki pola pikir yang lebih terbuka terhadap teknologi, manajemen organisasi (seperti kelompok tani), dan efisiensi rantai pasok. Petani dengan pendidikan menengah ke atas biasanya lebih mudah

untuk mengikuti standar sertifikasi seperti ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

Tingkat pendidikan formal dapat mempengaruhi produktivitas usahatani, tingkat melek huruf serta akses informasi, petani dengan tingkat pendidikan tinggi biasanya lebih terbuka dalam menerima inovasi dan lebih cepat dalam menerapkan teknologi baru, dan akan berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh petani, hal tersebut didukung oleh pernyataan Gusti dkk (2022) petani yang berpendidikan tinggi biasanya memiliki pola pikir yang lebih terbuka dalam menerima inovasi baru dan lebih cepat memahami teknologi baru sehingga dapat maju dan menghasilkan produksi pertanian yang lebih baik.

4.1.3 Realisasi Penerapan Capaian Prinsip ISPO

Peraturan Menteri Pertanian Indonesia Nomor 38 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia ISPO menetapkan prinsip, kriteria, dan indikator perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang terdiri dari 5 prinsip, 21 kriteria dan 33 indikator. Pemenuhan setiap prinsip ISPO pada pekebun kelapa sawit swadaya di Kecamatan Mori Utara disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Persentase Capaian Standar ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya yang diteliti.

Prinsip dan Bobot Nilai (%)	Capaian Desa			Rerata	Nilai Capaian (%)
	1	2	3		
Prinsip 1 Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan (21,21)	15,76	18,18	11,07	15,00	70,73
Prinsip 2 Penerapan praktek perkebunan yang baik (51,52)	41,56	43,53	40,44	41,84	81,22
Prinsip 3 Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (9,09)	5,45	6,06	5,36	5,63	61,88
Prinsip 4 Penerapan transparansi (15,15)	14,98	14,33	11,31	13,54	89,34
Prinsip 5 Peningkatan usaha secara berkelanjutan (3,03)	1,47	0,00	0,00	0,49	16,19
Jumlah rata-rata nilai capaian					63,87

Sumber : Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan data tabel 10 dapat dijelaskan rata-rata pemenuhan standar ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya di Kecamatan Mori Utara sebesar 63,87% dan terkategori rendah. Rendahnya penerapan ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya di Kecamatan Mori Utara ini karena rendahnya pada P5 (Peningkatan usaha secara berkelanjutan) dan P3 (Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati).

Rendahnya penerapan P5 dan P3 tersebut sejalan dengan penelitian Sabinus dkk (2020) terkait implementasi sertifikasi ISPO petani swadaya di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau dimana tingkat penerapan kriteria ISPO terkategori rendah yaitu hanya sebesar 65,96%. Petani swadaya masih belum memenuhi prinsip-prinsip ISPO terutama pada prinsip peningkatan usaha berkelanjutan dan prinsip pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Angka 63,87% ini adalah rata-rata persentase pencapaian standar ISPO dari ketiga desa. Meskipun pencapaian P2 (Penerapan praktek perkebunan yang baik) dan P4 (Penerapan transparansi) sangat tinggi, rendahnya nilai pada P5 (Peningkatan Usaha Berkelanjutan) secara signifikan menurunkan nilai pencapaian total.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Prinsip 1 (Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundangan)

Prinsip ini merupakan fondasi dasar dalam sistem sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap unit usaha (perusahaan atau pekebun) wajib menjalankan operasionalnya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Keberhasilan pada prinsip ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki legalitas yang sah dan tidak beroperasi di luar jalur hukum.

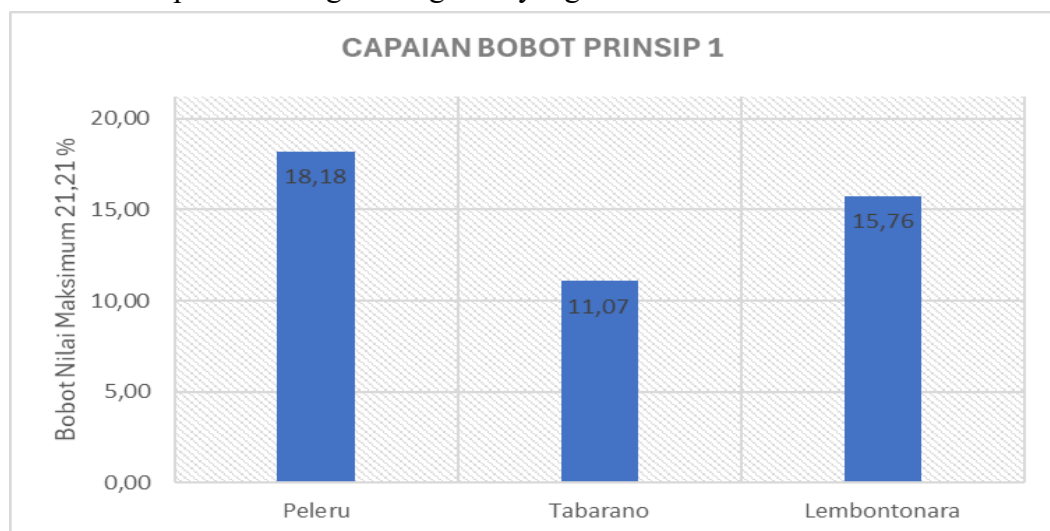
Menurut pendapat Fahamsyah & Pramudya (2017) konsep dasar sustainability dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit di Indonesia dapat diukur dari tingkat kepatuhan atau penerapan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

P1 sebesar 70,73% pada tabel 10 menunjukkan pencapaian relatif baik, menunjukkan ketiga desa secara umum mematuhi dasar hukum dan regulasi yang berlaku, namun masih ada celah (sekitar 29,27%) yang perlu diperbaiki untuk mencapai kepatuhan 100% yaitu pada kriteria sengketa lahan dan kompensasi dan kriteria terkait izin lingkungan.

Capaian pada prinsip ini jauh lebih tinggi dari hasil penelitian Muhammad Yusuf (2020), yang mana tingkat penerapan pada prinsip pertama hanya sebesar 48,48%, salah satu penyebabnya karena petani swadaya di Koperasi Beringin Jaya Kampung Koto Ringin Kecamatan Mempura Kabupaten Siak belum memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang merupakan salah satu syarat legalitas usaha perkebunan.

Capaian bobot nilai P1 pada masing-masing desa yang diteliti disajikan pada gambar 2 berikut.

Gambar 2. Capaian Bobot P1 (Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundangan) pada masing-masing desa yang diteliti.



Sumber : Data Primer dianalisis, 2025

Desa Peleru memiliki kinerja terbaik, berhasil memenuhi 18,18% dari bobot maksimal P1. Tabarano memiliki kinerja terendah, hanya mencapai 11,07% dari bobot maksimal P1. Lembontonara berada di posisi tengah dengan capaian 15,76%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian ketiga desa terhadap P1 adalah 15,00%.

Desa Peleru (18,18%) menunjukkan capaian tertinggi dalam kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan di antara ketiga desa. Nilai ini mendekati

sempurna (21,21%), yang mengindikasikan bahwa desa ini memiliki tingkat kepatuhan yang sangat baik dalam menjalankan regulasi yang berlaku.

Desa Lembontonara (15,76%) berada di posisi kedua. Nilai ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik, tetapi masih memiliki ruang untuk perbaikan (sekitar 5,45% kekurangan) untuk mencapai tingkat kepatuhan seperti Desa Peleru. Perbaikan yang perlu dilakukan pada kriteria kewajiban terkait izin lingkungan dan kriteria sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya.

Desa Tabarano (11,07%) menunjukkan capaian terendah di antara ketiga desa. Nilai yang hanya sedikit di atas 50% dari bobot nilai maksimum ini mengindikasikan adanya isu signifikan dalam kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan. Desa ini perlu perhatian dan tindakan perbaikan yang tinggi pada kriteria kewajiban terkait izin lingkungan dan kriteria sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya

4.2.2 Prinsip 2 (Penerapan Praktek Perkebunan yang Baik)

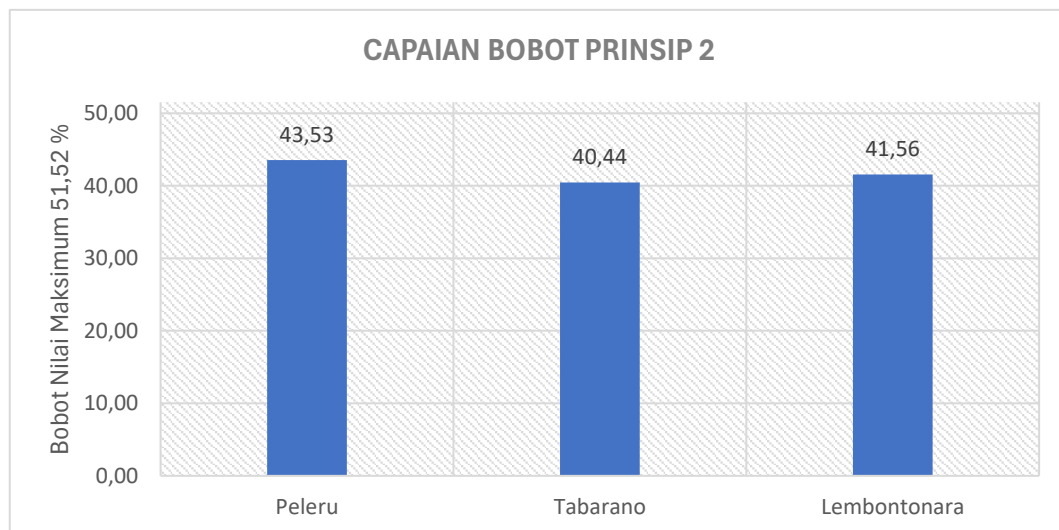
Prinsip penerapan Perkebunan yang baik (Good Agricultural Practies/GAP) harus dilakukan oleh pekebun swadaya agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas dan produktifitas kelapa sawit serta memberikan pendapatan pekebun yang maksimal.

Berdasarkan data pada Tabel 10, dapat dijelaskan bahwa capaian P2 sebesar 81,22% tertinggi diantara semua prinsip. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terbentuknya kelembagaan pekebun, implementasi praktik pengelolaan, penerapan teknis budidaya, perbenihan, penanaman, pengendalian OPT, pemanenan dan pengangkutan buah sudah sangat baik di ketiga desa tersebut.

Capaian indikator ini relatif hampir sama dengan hasil kajian Azizah dkk (2020) yang menunjukkan nilai capaian 83,33% dimana sudah terdaftar sebagai anggota kelompok tani, yang sedikit membedakan adalah pada kriteria penanaman pada lahan gambut ketiga desa di Kecamatan Mori Utara sebagian besar belum memiliki catatan untuk penanaman pada lahan gambut yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Capaian bobot nilai P2 pada masing-masing desa yang diteliti disajikan pada gambar 3 berikut.

Gambar 3. Capaian Bobot P2 (Penerapan Praktek Perkebunan yang Baik) pada masing-masing desa yang diteliti.



Sumber : Data Primer dianalisis, 2025

Gambar 3 diatas menunjukkan P2 merupakan faktor krusial dan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap dalam penilaian ini karena memiliki bobot maksimum (51,52%) lebih dari dua kali lipat bobot P1 (21,21%). Perbandingan dari bobot maksimum, Desa Peleru tertinggi diantara ketiganya (43,53%), Desa Lembontonara berada diposisi kedua (41,56%) dan Desa Tabarano diposisi

terendah (40,44%). Rata-rata capaian ketiga desa terhadap P1 adalah 41,84%. Ini menunjukkan bahwa performa ketiga wilayah tersebut relatif seragam.

Secara keseluruhan, ketiga desa tersebut memiliki performa yang cukup kompetitif karena semuanya berada di atas angka 40%. Namun, belum ada satu pun yang mencapai batas nilai maksimum (51,52%). Untuk mencapai nilai maksimum bagi ketiga desa tersebut pekebun harus memiliki dan melaksanakan SOP dan instruksi kerja cara pembukaan lahan tanpa bakar, memiliki dan melaksanakan SOP penanaman yang sesuai GAP, memiliki catatan pelaksanaan penanaman, memiliki catatan penanaman pada lahan gambut yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan memiliki rekaman catatan pemanenan.

4.2.3 Prinsip 3 (Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati)

Perencanaan lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan hidup, pengendalian lingkungan hidup, pemeliharaan lingkungan hidup, pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan lingkungan hidup.

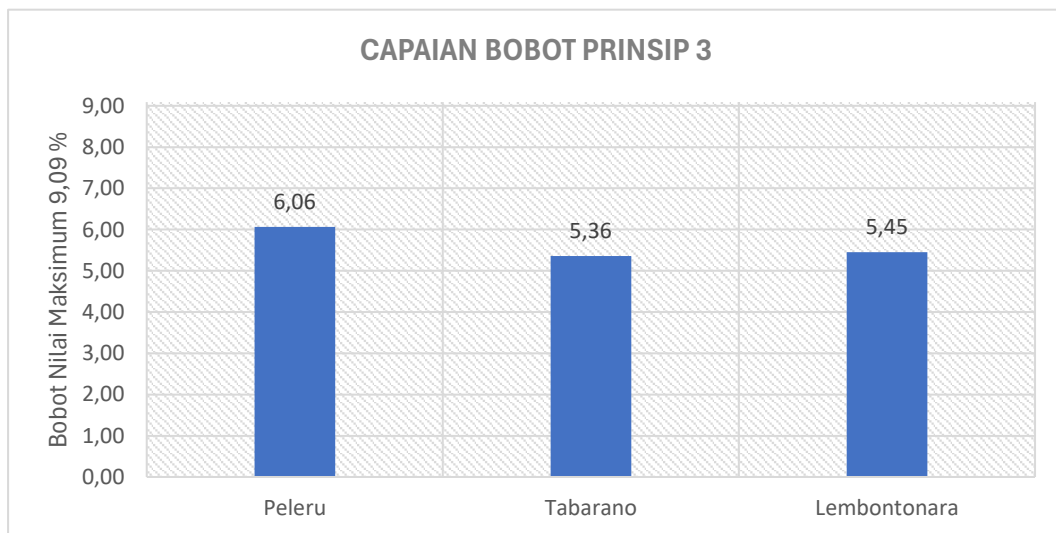
Salah satu konsep dan persyaratan yang menjadi pedoman penerapan ISPO bagi perkebun swadaya adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Penerapan tanggung jawab lingkungan hidup pada Perkebunan kelapa sawit swadaya bertujuan untuk mendorong tumbuhnya industri kelapa sawit yang lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup sehingga pengelolaan kelapa sawit dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu program ini berupaya untuk mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan kelapa sawit (Azizah dkk, 2020).

Capaian P3 pada tabel 10 di atas sebesar 61,88% menunjukkan pencapaian level sedang dan perlu adanya ruang untuk perbaikan. Capaian yang diperoleh serupa dengan hasil penelitian Triningsih dkk (2024) yakni sebesar 61,31%. Rendahnya P3 ini karena tidak terpenuhi kriteria pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity).

Penelitian Hadi dkk (2019) menunjukkan bahwa pada kriteria pelestarian biodiversity, pekebun, kelompok tani, koperasi harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian bobot nilai P3 pada masing-masing desa yang diteliti disajikan pada gambar 4 berikut.

Gambar 4. Capaian Bobot P3 (Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati) pada masing-masing desa yang diteliti.



Sumber : Data Primer dianalisis, 2025

Berbeda dengan P2 yang mencapai angka di atas 78%, gambar 4 diatas menunjukan pada P3 capaian tertinggi (Desa Peleru) baru menyentuh angka sekitar dua pertiga (66,67%) dari nilai maksimum 9,09%. Jarak antara Desa Tabarano

(terendah) dan Desa Lembontonara sangat tipis, hanya selisih bobot 0,09%. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas yang hampir serupa di kedua wilayah tersebut untuk prinsip ini.

Secara keseluruhan, kinerja pada P3 menunjukkan bahwa ketiga desa tersebut perlu perbaikan yang cukup besar (sekitar 33% - 41%) agar mencapai target maksimal. Perbaikan kinerja P3 pada Kriteria pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity) adalah pekebun mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan disekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulai usaha perkebunan tapi tidak terpenuhi pada indikator pekebun melakukan pencatatan terhadap satwa tersebut. Hal ini patut menjadi perhatian baik pekebun maupun dinas terkait karena keanekaragaman flora dan fauna hidup berdampingan secara harmoni pada ruang masing-masing dan harus tetap dijaga kelestariannya.

4.2.4 Prinsip 4 (Penerapan Transparansi)

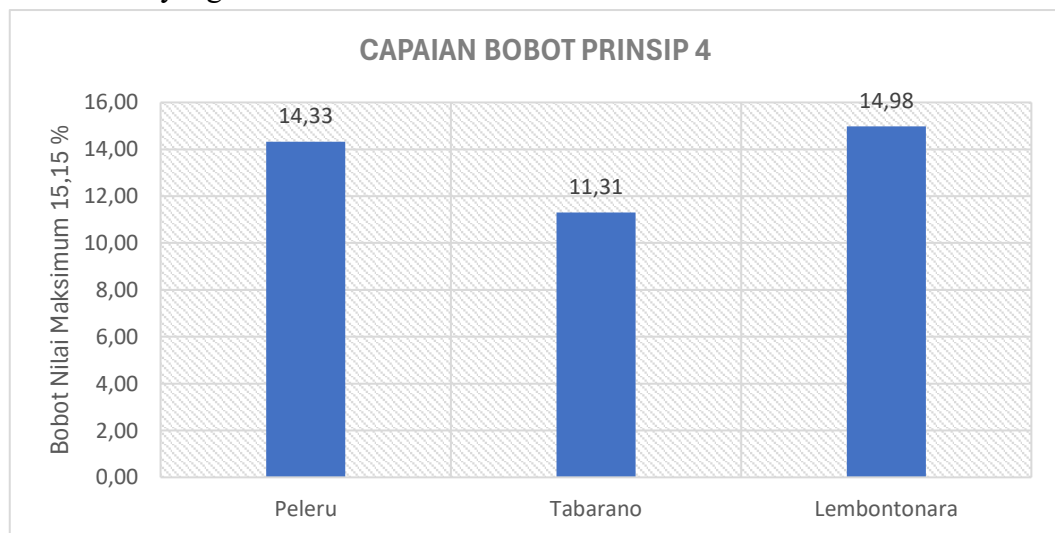
Penerapan transparansi meliputi pola penjualan dan kesepakatan harga TBS serta penyediaan data dan informasi. Pekebun harus memiliki informasi harga TBS berdasarkan penetapan harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS untuk setiap harga yang mengacu pada penetapan harga TBS kelapa sawit dan memiliki SOP pelayanan informasi serta memiliki dokumen tanggapan atau pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 10 menunjukkan capaian penerapan P4 sebesar 89,34% dikategorikan tinggi (sebanding dengan P2). Menunjukkan keterbukaan informasi yang sangat baik terkait harga TBS dan pemberian informasi kepada pemangku kepentingan.

Hasil kajian Nurjanah dkk (2023) tentang Analisis Keberlanjutan Perkebunan Sawit Rakyat dalam Mendukung Indonesian Sustainable Palm Oil di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin memperoleh capaian P4 relatif jauh lebih rendah yaitu hanya sebesar 21%. Penerapan P4 belum tercapai dalam pekebun karena tidak memiliki informasi harga TBS berdasarkan penetapan harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS untuk setiap tujuan penjualan, pekebun hanya mengetahui harga dari tengkulak dan tidak mengetahui harga dari pabrik maupun penetapan harga dari DISBUN, prinsip ini seharusnya diwujudkan dengan adanya penyampaian harga TBS secara transparan kepada anggota tercipta kepercayaan dan kelancaran proses penjualan TBS dari anggota melalui kelompok.

Capaian bobot nilai P4 pada masing-masing desa yang diteliti disajikan pada gambar 5 berikut.

Gambar 5. Capaian Bobot P4 (Penerapan Transparansi) pada masing-masing desa yang diteliti.



Sumber : Data Primer dianalisis, 2025

Berdasarkan gambar 5 diatas, dapat dijelaskan bahwa walaupun Desa Lembontonara (14,98%) dan Desa Peleru (14,33%) hampir mendekati kategori

tinggi, namun Desa Tabarano (11,31%) masih memiliki kesenjangan yang cukup jauh dibandingkan dua desa lainnya sehingga mempengaruhi performa nilai capaian untuk ketiga desa di prinsip tersebut.

Sesuai hasil wawancara kepada pekebun, secara keseluruhan ketiga desa tersebut, untuk mencapai kategori sangat tinggi ada beberapa pekebun terutama di Desa Tabarano wajib memiliki SOP pelayanan informasi dan mempunyai dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.

4.2.5 Prinsip 5 (Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan)

Pada prinsip yang terakhir kriterianya yaitu meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit secara berkelanjutan. Indikatornya Adalah pekebun memiliki dokumen hasil penerapan/perbaikan peningkatan usaha yang berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel 10, Capaian penerapan P5 oleh pekebun hanya 16,19%, terendah secara signifikan. Ini adalah area kelemahan utama dalam pemenuhan capaian sertifikasi ISPO pekebun swadaya di Kecamatan Mori Utara, hasil ini menunjukkan bahwa sebanyak 83,81% pekebun swadaya di ketiga desa tersebut tidak memiliki dokumen hasil penerapan/perbaikan peningkatan usaha yang berkelanjutan.

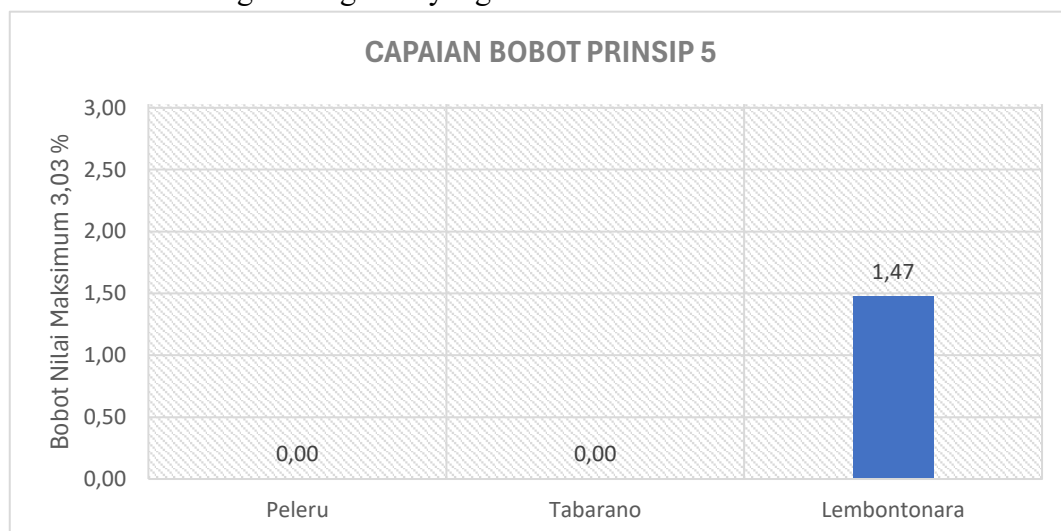
Hal ini selaras dengan hasil penelitian Siti Nuryanti (2019) yang termasuk dalam kriteria sangat rendah, penerapan P5 standar ISPO pekebun swadaya di Kelompok Tani Petani Makmur memperoleh nilai capaian 0%. Kelompok tani

belum memenuhi indikator ini. Seluruh kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pekebun masih dilakukan secara individu. Tidak terpenuhinya indikator ini disebabkan kurangnya pengetahuan, keahlian dan kemauan pekebun dalam menjalankan dan meningkatkan organisasi (Nuryanti, 2019).

Pekebun, kelompok tani, koperasi, dengan bimbingan lembaga/ instansi terkait lainnya harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.

Capaian bobot nilai P5 pada masing-masing desa yang diteliti disajikan pada gambar 6 berikut.

Gambar 6. Capaian Bobot P5 (Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan) pada masing-masing desa yang diteliti.



Sumber : Data Primer dianalisis, 2025

Berdasarkan hasil penelitian, gambar 6 menunjukkan Desa Lembontonara (1,47%) adalah satu-satunya desa yang memiliki catatan capaian walaupun tidak mencapai 50% dari bobot nilai maksimum P5. Desa Peleru dan Desa Tabarano tidak menunjukkan capaian sama sekali (0,00%).

P5 adalah titik terlemah dari ketiga desa, pekebun yang memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan tidak tercapai. Tidak terpenuhinya penerapan pada prinsip ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan, keahlian dan kemauan pekebun dalam menjalankan dan memajukan organisasi. Pekebun juga belum memenuhi prinsip ini dikarenakan kurangnya bantuan dari lembaga terkait untuk memenuhi cara mencapai sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan.

4.2.6 Analisis SWOT

4.2.6.1 Analisis IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) dan Analisis EFAS (*External Factors Analysis Summary*)

IFAS dan EFAS merupakan alat analisis kuantitatif bagian dari analisis SWOT untuk merumuskan strategi, termasuk strategi percepatan pencapaian sertifikasi ISPO bagi pekebun kelapa sawit swadaya. IFAS digunakan untuk merangkum dan menilai kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) internal. Masing-masing faktor diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya, lalu diberi skor berdasarkan kondisi aktual, sehingga menghasilkan skor tertimbang yang mencerminkan kekuatan atau kelemahan dominan dari suatu bisnis. Sementara itu, EFAS (menganalisis faktor eksternal, yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang mempengaruhi tingkat capaian sertifikasi ISPO (Rangkuti, 2019).

Perhitungan skor pada IFAS dihasilkan dari perkalian antara nilai bobot dan rating. Rincian IFAS pengembangan strategi capaian standar ISPO pekebun kelapa sawit swadaya di Kecamatan Mori Utara disajikan pada tabel 11.

Tabel 11. Perhitungan IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) Pengembangan Strategi Capaian Standar ISPO Pekebun Kelapa Sawit Swadaya di Kecamatan Mori Utara.

	Faktor Strategis	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (S)	1. Organisasi pekebun/kelompok tani	0,11	4	0,43
	2. Legalitas kepemilikan lahan	0,11	3	0,32
	3. Penggunaan bibit unggul	0,11	3	0,32
	4. Motivasi ekonomi	0,04	1	0,04
	5. Pengalaman usaha tani	0,07	2	0,14
	6. Dukungan PBS/PBN dalam sertifikasi ISPO	0,04	1	0,04
	Sub Total	0,46		1,29
Kelemahan (W)	1. Pengetahuan dan ketrampilan	0,11	4	0,43
	2. Kapasitas organisasi lemah	0,11	3	0,32
	3. Rendahnya penerapan GAP	0,11	3	0,32
	4. Keterbatasan modal dan biaya sertifikasi	0,11	4	0,43
	5. Pencatatan dan administrasi kebun	0,11	4	0,43
	Sub Total	0,54		1,93
	Total IFAS	1,00		3,21

Sumber : Data Primer dianalisis, 2025

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 11, diperoleh total skor kekuatan sebesar 1,29 dan skor kelemahan sebesar 1,93, sehingga menghasilkan nilai X sebagai berikut:

$$X = \text{Kekuatan} - \text{Kelemahan} = 1,29 - 1,93 = -0,64$$

Seperti IFAS, pada EFAS setiap faktor eksternal juga dinilai berdasarkan bobot dan skor, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh luar terhadap strategi yang harus diambil oleh pekebun kelapa sawit swadaya. Perhitungan EFAS pengembangan strategi capaian standar ISPO pekebun kelapa sawit swadaya di Kecamatan Mori Utara disajikan pada tabel 12.

Tabel 12. Perhitungan EFAS (*External Factors Analysis Summary*) Pengembangan Strategi Capaian Standar ISPO Pekebun Kelapa Sawit Swadaya di Kecamatan Mori Utara.

	Faktor Strategis	Bobot	Rating	Skor
Peluang (O)	1. Sifat mandatory ISPO	0,19	4	0,75
	2. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait	0,13	3	0,38
	3. Tuntutan pasar global berkelanjutan	0,13	2	0,25
	4. Perkembangan teknologi	0,13	3	0,38
	5. Insentif harga	0,06	3	0,19
	Sub Total	0,63		1,94
Ancaman (T)	1. Isu lingkungan dan kampanye negatif	0,13	1	0,13
	2. Regulasi ISPO yang ketat	0,19	2	0,38
	3. Ketidakstabilan harga CPO/TBS	0,06	2	0,13
	Sub Total	0,38		0,63
	Total EFAS	1,00		2,56

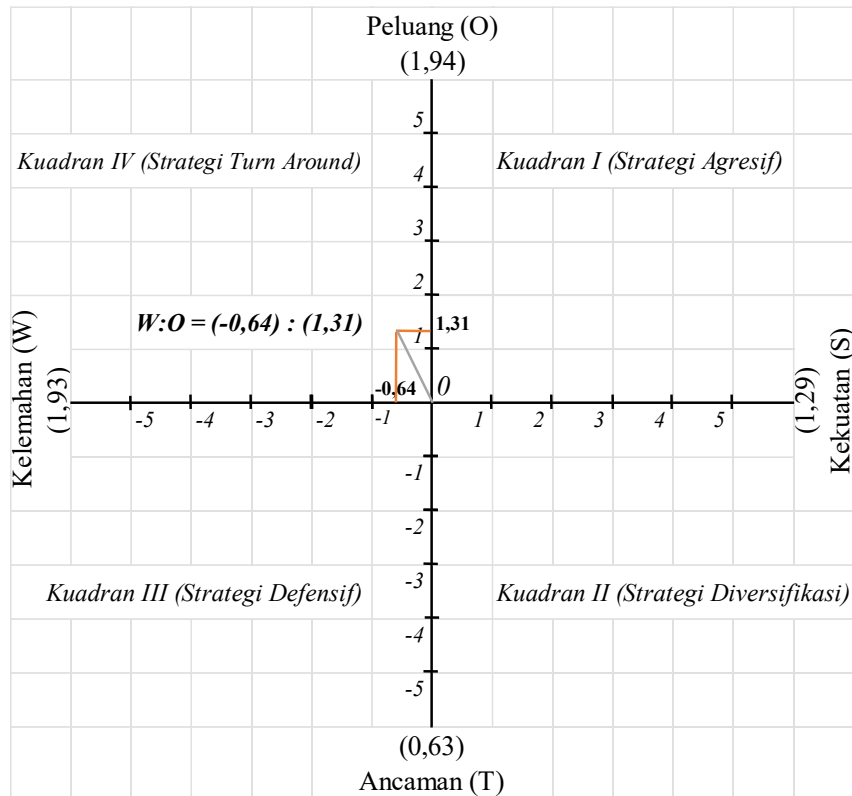
Sumber : Data Primer dianalisis, 2025

Analisis EFAS mencakup identifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Dengan pendekatan yang sama, pada tabel 12 skor total untuk peluang diperoleh sebesar 1,94 dan skor ancaman sebesar 0,63, sehingga diperoleh nilai Y sebagai berikut:

$$Y = \text{Peluang} - \text{Ancaman} = 1,94 - 0,63 = 1,31$$

Dari total skor IFAS dan EFAS, akan terbentuk titik acuan matriks kuadran SWOT untuk mengetahui posisi strategi-strategi pengembangan capaian standar ISPO yang akan dilaksanakan. Sehingga dapat dibuat rekomendasi strategi dari nilai capaian standar ISPO yang diperoleh tersebut. Nilai total dari faktor internal dan eksternal dapat digambarkan pada matriks kuadran SWOT serta kombinasi matriks SWOT. Matriks kuadran SWOT dapat dilihat pada gambar 7 berikut.

Gambar 7. Matriks Kuadran SWOT Pengembangan Strategi Capaian Standar ISPO Pekebun Kelapa Sawit di Kecamatan Mori Utara.



Sumber : Data Primer dianalisis, 2025

Berdasarkan gambar 7, dapat diketahui bahwa posisi pengembangan strategi capaian standar ISPO pekebun kelapa sawit di Kecamatan Mori Utara berada pada posisi sumbu diantara sumbu Peluang (*opportunity*) dan Kelemahan (*weaknesses*) yakni di Kuadran IV (negatif) dititik $W:O = (-0,64 : 1,31)$. Artinya, pekebun swadaya menghadapi peluang yang sangat besar untuk memenuhi capaian standar ISPO namun terkendala oleh kelemahan internal yang dominan dibandingkan kekuatan yang dimiliki.

Strategi yang direkomendasikan adalah strategi *Turn Around* (penyelamatan) dengan memanfaatkan peluang (*opportunities*) eksternal untuk memperbaiki kelemahan (*weaknesses*) internal untuk memenuhi capaian standar

ISPO terutama yang nilai capaiannya paling rendah yaitu pada Prinsip 3 (Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati) dan Prinsip 5 (Peningkatan usaha secara berkelanjutan).

Selanjutnya, setelah mendapatkan poin-poin dari IFAS dan EFAS, hasilnya dimasukkan ke dalam Matriks SWOT. Matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) adalah alat yang digunakan untuk merumuskan 4 alternatif strategi kombinasi yakni SO, WO, ST, dan WT. Rumusan alternatif strategi merupakan alternatif yang digunakan pada pengembangan penerapan capaian sertifikasi ISPO di wilayah studi kasus Kecamatan Mori Utara.

Berikut ini adalah hasil dari kombinasi matriks yang didapat dari indikator dan dilakukan kombinasi dari faktor internal dan eksternal.

Tabel 13. Matriks SWOT Analisis Pengembangan Strategi Capaian Standar ISPO Pekebun Kelapa Sawit di Kecamatan Mori Utara.

Internal Eksternal	Kekuatan (S) 1. Organisasi pekebun/ kelompok tani 2. Legalitas kepemilikan lahan 3. Penggunaan bibit unggul 4. Motivasi ekonomi 5. Pengalaman usaha tani. 6. Dukungan PBS/PBN dalam sertifikasi ISPO	Kelemahan (W) 1. Pengetahuan dan keterampilan 2. Kapasitas organisasi lemah 3. Rendahnya penerapan GAP 4. Keterbatasan modal dan biaya sertifikasi 5. Pencatatan dan administrasi kebun
	Peluang (O) 1. Sifat mandatory ISPO 2. Dukungan pemerintah dan Lembaga terkait 3. Tuntutan pasar global berkelanjutan 4. Perkembangan teknologi 5. Insentif harga	Strategi (SO) 1. Memanfaatkan kelompok tani dengan dukungan pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi ISPO karena sifatnya yang wajib (mandatory) (S1,O1,O2). 2. Menggunakan legalitas lahan yang sah untuk mengakses bantuan pemerintah dan dukungan

	<p>lembaga terkait secara lebih maksimal (S1,O2).</p> <p>3. Menggabungkan motivasi ekonomi dan pengalaman usaha tani dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi tuntutan pasar global yang berkelanjutan (S4,S5,O3).</p>	<p>seperti aplikasi manajemen kebun untuk mempermudah sistem pencatatan dan administrasi kebun yang selama ini masih lemah (O4,W5).</p> <p>3. Menggunakan momentum mandatory ISPO untuk mengakses dana hibah pemerintah (APBN/APBD/ BPDP) guna memenuhi modal dan biaya sertifikasi ISPO agar tuntutan pasar global dan sifat mandatory ISPO dapat terpenuhi (O1,O2,O3,W4).</p>
<p>Ancaman (T)</p> <p>1. Isu lingkungan dan kampanye negatif</p> <p>2. Regulasi ISPO yang ketat</p> <p>3. Ketidakstabilan harga CPO/TBS</p>	<p>Strategi (ST)</p> <p>1. Melaksanakan pengelolaan kebun yang berkelanjutan atas dasar legalitas lahan yang sah, penggunaan bibit unggul, pengalaman usaha tani serta dukungan PBS/PBN guna menangkali isu lingkungan dan kampanye negatif (S2,S3,S5,S6,T1).</p> <p>2. Memanfaatkan kelompok tani untuk membangun kontrak kerja sama jangka panjang dengan PKS PBS/PBN guna memitigasi risiko ketidakstabilan harga TBS (S1,T3).</p> <p>3. Memanfaatkan pengalaman usaha tani dan motivasi ekonomi untuk mengoptimalkan beradaptasi dengan regulasi ISPO yang semakin ketat (S4,S5,T2)</p>	<p>Strategi (WT)</p> <p>1. Mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah (APBN/APBD/BPDP) terkait keterbatasan modal dan biaya sertifikasi di tengah ketidakstabilan harga (W4,T3).</p> <p>2. Memperbaiki penerapan GAP dan pencatatan kebun guna meminimalisir celah bagi isu lingkungan dan kampanye negatif (W3,W5,T1).</p> <p>3. Meningkatkan kesadaran dasar tentang isu lingkungan untuk mencegah praktik perkebunan yang salah, guna menghindari diskriminasi produk oleh regulasi pasar (W1,T1).</p>

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan matriks SWOT pada tabel 13 diatas, didapatkan alternatif strategi kombinasi SO, WO, ST, dan WT faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Strategi (SO) :

- 1) Memanfaatkan kelompok tani dengan dukungan pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi ISPO karena sifatnya yang wajib (mandatory).
- 2) Menggunakan legalitas lahan yang sah untuk mengakses bantuan pemerintah dan dukungan lembaga terkait secara lebih maksimal.
- 3) Menggabungkan motivasi ekonomi dan pengalaman usaha tani dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi tuntutan pasar global yang berkelanjutan.

2. Strategi (WO):

- 1) Mengikuti program pelatihan budidaya sesuai GAP dan pelatihan ISPO yang difasilitasi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan keterampilan pekebun.
- 2) Memanfaatkan perkembangan teknologi seperti aplikasi manajemen kebun untuk mempermudah sistem pencatatan dan administrasi kebun yang selama ini masih lemah.
- 3) Menggunakan momentum mandatory ISPO untuk mengakses dana hibah pemerintah (APBN/APBD/ BPDP) guna memenuhi modal dan biaya sertifikasi ISPO agar tuntutan pasar global dan sifat mandatory ISPO dapat terpenuhi.

3. Strategi (ST):

- 1) Melaksanakan pengelolaan kebun yang berkelanjutan atas dasar legalitas lahan yang sah, penggunaan bibit unggul, pengalaman usaha tani serta dukungan PBS/PBN guna menangkal isu lingkungan dan kampanye negatif.
- 2) Memanfaatkan kelompok tani untuk membangun kontrak kerja sama jangka panjang dengan PKS PBS/PBN guna memitigasi risiko ketidakstabilan harga TBS.
- 3) Memanfaatkan pengalaman usaha tani dan motivasi ekonomi untuk mengoptimalkan beradaptasi dengan regulasi ISPO yang semakin ketat.

4. Strategi WT:

- 1) Mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah (APBN/APBD/BPDP) terkait keterbatasan modal dan biaya sertifikasi di tengah ketidakstabilan harga.
- 2) Memperbaiki penerapan GAP dan pencatatan kebun guna meminimalisir celah bagi isu lingkungan dan kampanye negatif.
- 3) Meningkatkan kesadaran dasar tentang isu lingkungan untuk mencegah praktik perkebunan yang salah, guna menghindari diskriminasi produk oleh regulasi pasar.

Dari alternatif-alternatif strategi diatas, maka dapat ditentukan alternatif strategi yang tepat dalam pengembangan capaian standar ISPO pekebun kelapa sawit swadaya di Kecamatan Mori Utara sesuai dengan matriks kuadran SWOT pada gambar 7 adalah strategi WO yakni strategi yang fokus memperbaiki kelemahan internal dengan cara memanfaatkan peluang eksternal yang besar dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengikuti program pelatihan budidaya sesuai GAP dan pelatihan ISPO yang difasilitasi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan keterampilan pekebun.
2. Memanfaatkan perkembangan teknologi seperti aplikasi manajemen kebun untuk mempermudah sistem pencatatan dan administrasi kebun yang selama ini masih lemah.
3. Menggunakan momentum mandatory ISPO untuk mengakses dana hibah pemerintah (APBN/APBD/ BPDP) guna memenuhi modal dan biaya sertifikasi ISPO agar tuntutan pasar global dan sifat mandatory ISPO dapat terpenuhi.

Alternatif strategi yang dihasilkan tersebut diatas berbeda dengan hasil penelitian Syaiful Hadi dkk (2023) di perkebunan kelapa sawit swadaya Kabupaten Siak Provinsi Riau yang menghasilkan strategi prioritas untuk percepatan sertifikasi ISPO adalah: 1) percepatan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), 2) penguatan kelembagaan penyelenggara ISPO mulai dari pusat hingga ke kabupaten sentra kelapa sawit, dan 3) penyediaan dukungan tenaga pendamping.

Berdasarkan alternatif yang dipilih dalam pengembangan capaian standar ISPO pekebun kelapa sawit swadaya di Kecamatan Mori Utara tersebut diatas, maka implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menandatangani MoU dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan BPDP

untuk memfasilitasi program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDMPKS). Pemerintah daerah secara rutin merekrut dan mengirimkan perwakilan petani sawit dari berbagai kecamatan (termasuk Mori Utara) untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan yang diberikan mencakup teknis Good Agricultural Practices (GAP), pengelolaan sarana prasarana, penguatan kelembagaan kelompok tani, hingga teknis pemetaan lokasi kebun.

2. Penataan Administrasi Dasar Melalui STDB.

Terkait kelemahan sistem pencatatan dan administrasi pekebun, pemerintah daerah fokus pada penyelesaian penataan administrasi dasar agar bisa beralih ke aplikasi manajemen kebun digital tingkat lanjut. Dinas Pertanian dan Pangan Daerah gencar melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi manajemen kebun di kantong-kantong perkebunan sawit rakyat. Dokumen administrasi ini merupakan prasyarat mutlak (mandatory) agar kebun sawit rakyat bisa didaftarkan untuk proses sertifikasi ISPO.

3. Fasilitasi Akses Dana APBN, APBD dan BPDP untuk sertifikasi ISPO.

Pemerintah daerah turun tangan langsung sebagai fasilitator agar pekebun tidak terbebani biaya modal mandiri, dengan cara menjembatani kelompok tani untuk mengakses dana hibah pemerintah. Dinas Pertanian dan Pangan Daerah secara aktif mendampingi Kelompok Tani mendapatkan modal dan biaya demi menyukseskan program sertifikasi ISPO kedepannya.

Secara keseluruhan, strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara bertumpu pada kolaborasi pendanaan pusat. Pemda bertindak sebagai jembatan

yang membereskan kelembagaan petani di Mori Utara agar siap menerima intervensi bantuan pemerintah, sehingga tuntutan mandatory ISPO dapat terpenuhi tanpa memberatkan ekonomi pekebun.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Capaian standar ISPO perkebunan kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Mori Utara dengan nilai pemenuhan rata-rata sebesar 63,87% (kriteria rendah) dan belum layak untuk disertifikasi ISPO karena tidak mencapai nilai 100% (kriteria tinggi). Rendahnya pemenuhan ini karena rendahnya capaian pada Prinsip 3 (Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati) dan Prinsip 5 (Peningkatan usaha secara berkelanjutan).
2. Rancangan strategi yang akan digunakan sebagai rekomendasi perbaikan untuk percepatan pemenuhan capaian standar ISPO Perkebunan kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Mori Utara adalah: 1) mengikuti program pelatihan budidaya sesuai GAP dan pelatihan ISPO yang difasilitasi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan keterampilan pekebun, 2) memanfaatkan perkembangan teknologi seperti aplikasi manajemen kebun untuk mempermudah sistem pencatatan dan administrasi kebun yang selama ini masih lemah, dan 3) Menggunakan momentum mandatory ISPO untuk mengakses dana hibah pemerintah (APBN/APBD/

BPDP) guna memenuhi modal dan biaya sertifikasi ISPO agar tuntutan pasar global dan sifat mandatory ISPO dapat terpenuhi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya dari organisasi pekebun/kelompok tani untuk meningkatkan kesadaran anggotanya mengenai peningkatan penerapan teknik budidaya kelapa sawit yang benar (GAP) serta manfaat dan peluang yang dapat diperoleh melalui partisipasi dalam program ISPO. Kampanye penyuluhan dan seminar dapat membantu menyampaikan informasi yang lebih luas tentang keberlanjutan, praktik pertanian yang baik, dan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dengan menjadi bagian dari ISPO.
2. Kepada pemangku kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar memanfaatkan organisasi pekebun/kelompok tani untuk melaksanakan sosialisasi, pendampingan sertifikasi agar indikator-indikator dalam prinsip ISPO yang belum terpenuhi dapat segera diperbaiki sehingga sertifikasi ISPO pekebun swadaya di Kecamatan Mori Utara dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. Palembang. Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, Vol. 3 No. 1: 3
- Anwar.R., Sitorus.S.R.P., Fauzi.A.M., Widiatmaka., & Machfud. (2016). Pencapaian Standar Indonesia Sustainable Palm Oil (Ispo) Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur. Jurnal Littri, 22(1), 11–18. <https://doi.org/10.21082/Littri.V22n1.2016.11-18>
- Azizah., Hadi, S., & Dewi, N. (2020). Analisis Penerapan ISPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit Pekebun Swadaya di Kota Dumai. Jurnal Agribisnis Vol: 22 No: 1: 126-135
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Tanaman Perkebunan Tahunan Indonesia. Vol:1, 2025. Badan Pusat Statistik.
- Bakhtiar, I., Suradiredja, D., Santoso, H., Sai, A. S., & Ichsan. (2018). Sawit Rakyat Pemetaan Kerangka Kebijakan, Kondisi Nyata Dan Aksi Lapangan. In (Vol. 4, Nomor 1). Yayasan KEHATI.
- Binus University. (2022). Stratified Random Sampling. Malang, Jawa Timur.
- Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. 2023. Statistik Perkebunan Kabupaten Morowali Utara. Kolonodale (ID). Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. (2025). Angka Tetap (ATAP) Tahun 2024. Statistik Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah. Palu (ID). Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. (2024). Angka Tetap (ATAP) Tahun 2023. Statistik Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah. Palu (ID). Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. (2023). Angka Tetap (ATAP) Tahun 2022. Statistik Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah. Palu (ID). Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. (2022). Angka Tetap (ATAP) Tahun 2021. Statistik Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah. Palu (ID). Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

- Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. (2021). Angka Tetap (ATAP) Tahun 2020. Statistik Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah. Palu (ID). Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Direktur, J. P. (2020). Statistik Perkebunan Non Unggulan Nasional 2020-2022. *Sekretariat Direktorat Jendral Perkebunan*, 1–572.
- European Forest Institute, 2024. Sertifikasi ISPO untuk Petani Kecil: proses dan tantangan.
- Fahamsyah, E., & Pramudya, E. P. (2017). Sistem ISPO untuk Menjawab Tantangan dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 43(1).
- Gusti, I. M., Gayatri, S., & Prasetyo, A. S. (2022). The Affecting of Farmer Ages, Level of Education and Farm Experience of the farming knowledge about Kartu Tani beneficial and method of use in Parakan Distric, Temanggung Regency. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2),209–221. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.926>
- Hadi, S., Rosnita and N. Dewi. (2019). Pengembangan Model Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Pola Swadaya. Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. BPDP-KS. Jakarta.
- Info Sawit (2024). Per April 2024, Lahan Bersertifikat ISPO baru capai 35,6 Persen dari Total Lahan Sawit Nasional. Depok (ID). PT. Mitra Media Nusantara.
- Kementerian Pertanian, 2023. Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Kementerian Pertanian, 2024. Sawit Indonesia dalam Dinamika Pasar Dunia. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Novia, R. A. (2011). Respon Petani Terhadap Kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tnaman Terpadu (SLPTT) DI Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Respon Peta. 7(2), 48–60.
- Nurjanah, R., Wirianata, H., & Wilisiani. F. (2023). Analisis Keberlanjutan Perkebunan Sawit Rakyat dalam Mendukung Indonesian Sustainable Palm Oil di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Yogyakarta (ID). Magister Manajemen Perkebunan INSTIPER:3-4.
- Nurliza. (2019). Model Adopsi Inovasi Kelembagaan. Pontianak: IAIN Pontianak Press.

- Nuryanti, S. (2019). Analysis on sustainability of oil palm independent smallholder (A Case Study of Oil Palm Independent Smallholder Kelompok Tani Petani Makmur at Lubuk Ongong Village, Bandar Sei Kijang Sub District, Pelalawan District). *Jurnal Sungkai*, 7(1), 61–78.
- Permentan, 11. (2015). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO).
- Permentan, 38. (2020). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/Ot.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
- Perpres, 44 (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Purwanto, E. (2020). Ispo Baru: Harapan Baru Bagi Penguatan Tata Kelola Sawit? In *Tropenbos Indonesia*: 1–8.
- Putu, E. S, (2024). I Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Denpasar. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. Vol: 9 No: 4: 36
- Rangkuti, F. (2019). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Riady., Caren., & Badarul, K. H. H. (2023). Campaign Minyak Kelapa Sawit Dari Uni Eropa The Analysis Of Indonesia ' S Efforts In Combating The Black Campaign Against Palm Oil From The European Union. 28(1):53–66.
- Rosmegawati. (2021). Peran Aspek Tehnologi Pertanian Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Produktivitas Produksi Kelapa Sawit. *Jurnal Agrisia-Vol.13 No.2 Tahun 2021*, 13(2):73–90.
- Rosnita, Yulida, R., Hadi, S., Andriani, Y., & Septya, F. (2022). Persepsi Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Dalam Penerapan Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) di Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Volume 16, Nomor 1.
- Sabinus, Yurisintae, E., & Oktoriana, S. (2021). Implementasi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) pada Petani Kelapa Sawit Swadaya di Kabupaten Sanggau. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics): Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(2), 166–179. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.19184/jsep.v14i2.21161>.

- Sahdan, G., & Setiyawati, Z. (2019). Petani Buntung Di Negeri Sawit : Politik Pengetahuan Membela Petani Sawit.
- Saragih, I. K., Rachmina, D., & Krisnamurthi, B. (2020). Analisis Status Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Provinsi Jambi. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(1):17–32.
- Sari, M. I., Hadi, S., & Rosnita. (2022). Analisis Capaian ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Agribisnis* Vol: 24 No: 1:2-3.
- Sulistiyowati, H., Sarbino., & Arifin. (2021). Studi Keragaan Kebun Kelapa Sawit Swadaya di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Teknologi Perkebunan dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan*. Universitas Tanjung Pura. Pontianak: 9
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmu Profesi Pendidikan*. Vol: 9 No: 4:2722.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*: 161-162
- Triningsih, C., Hadi, S., & Dewi, N. (2024). Kesiapan Percepatan Sertifikasi ISPO Di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya Provinsi Riau. *Jurnal Agri Sains*, Vol. 8 No. 2 : 17-23
- Vicki, V., Nurliza, N., & Dolorosa, E. (2021). Niat Perilaku Petani Sawit Swadaya Dalam Peningkatan Usaha Berkelanjutan Di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. *Sepa: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 18(1):112.
- Yanti, I. R., Nuraeni, N., & Rasyid, R. (2022). Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga Petani Kelapa Sawit Di Desa Pebatae. *Wiratani: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 5(1):1.
- Yusuf, M. (2020). Analisis Penerapan Sertifikasi ISPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Koperasi Beringin Jaya Kampung Koto Ringin Kecamatan Mempura Kabupaten Siak [Skripsi]. Pekanbaru: Fakultas Pertanian Universitas Riau.
- Yutika, F., Cahyadi, E. R., & Mulyati, H. (2019). Perilaku Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Dan Pola Plasma Terhadap Praktik Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar, Riau. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(2), 102–112. <https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2:102-112>.
- Winarto, Y. (2020). Hingga Januari 2020 Komisi ISPO telah melibatkan 621 sertifikat.

LAMPIRAN

KUISIONER ANALISIS CAPAIAN SERTIFIKASI ISPO (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA SWADAYA (STUDI KASUS DI KECAMATAN MORI UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Umur : Tahun
Jenis Kelamin : L/P
Pendidikan : 1. SD
2. SMP
3. SMA
4. Diploma/Sarjana
5. Pasca Sarjana
Usia Tanaman :
Luas Kebun :
Nama Kelompok Tani :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan : Mori Utara
Kabupaten : Morowali Utara

II. MATRIKS SERTIFIKASI ISPO

Prinsip 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan

NO.	STANDAR ISPO		KESESUAIAN	
	KRITERIA	INDIKATOR	YA	TIDAK
1.1	Legalitas dan Pengelolaan Pekebun	Mempunyai sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.		
1.2	Lokasi Pekebun	Lahan pekebun mengacu kepada penetapan tata ruang.		
1.3	Sengketa Lahan dan Kompensasi serta Sengketa Lainnya	Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya: 1. Mempunyai dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa dan tersedia peta lokasi sengketa lahan. 2. Mempunyai salinan perjanjian yang telah disepakati.		
1.4	Legalitas Usaha Perkebun	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).		
1.5	Kewajiban terkait Izin Lingkungan	1. Memiliki izin lingkungan sesuai SPPL. 2. Memiliki catatan pelaksanaan penerapan SPPL.		

Prinsip 2. Penerapan praktek perkebunan yang baik

NO.	STANDAR ISPO		KESESUAIAN	
	KRITERIA	INDIKATOR	YA	TIDAK
2.1	Organisasi Kelembagaan Pekebun. Pekebun dapat bergabung dalam kelompok tani atau koperasi sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggotanya.	1. Pekebun memiliki kelembagaan dalam bentuk kelompok tani atau koperasi. 2. Mempunyai dokumen pembentukan kelompok tani dan/atau koperasi yang diketahui oleh pejabat berwenang.		
2.2	Pengelolaan Pekebun	1. Memiliki dokumen rencana kegiatan operasional pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi. 2. Tersedia laporan kegiatan pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi.		
2.3	Penerapan Teknis Budidaya Dan Pengangkutan Kelapa Sawit.			
2.3.1	Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.	Memiliki dan melaksanakan SOP dan instruksi kerja cara pembukaan lahan tanpa bakar.		
2.3.2	Perbenihan. Untuk mendukung produktivitas tanaman dari Pekebun, benih yang digunakan harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.	1. Menggunakan benih tanaman berasal dari produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari instansi yang berwenang dan diakui oleh 2. Mempunyai catatan asal benih.		

2.3.2	<p>Penanaman pada Lahan Mineral.</p> <p>Pekebun swadaya dalam melakukan penanaman harus sesuai baku teknis dalam mendukung produktivitas tanaman.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dan melaksanakan SOP penanaman yang sesuai Good Agricultural Practises (GAP). 2. Memiliki catatan pelaksanaan penanaman. 		
2.3.4	<p>Penanaman pada Lahan Gambut.</p> <p>Penanaman kelapa sawit di kebun swadaya di lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.</p>	<p>Memiliki catatan untuk penanaman pada lahan gambut yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>		
2.3.5	<p>Pemeliharaan Tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman. 2. Memiliki catatan mengenai pemupukan tanaman dan pelaksanaan pemeliharaan tanaman 		
2.3.6	<p>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dan melaksanakan Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)/ Integrated Pest Management (IPM). 2. Mempunyai sarana pengendalian OPT sesuai petunjuk teknis serta tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih 		
2.3.7	<p>Pemanenan.</p> <p>Pekebun, kelompok tani, koperasi memastikan bahwa panen dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang benar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki acuan teknis untuk buah yang dipanen adalah buah matang panen dan dilakukan pada waktu yang tepat. 2. Memiliki rekaman/ catatan pelaksanaan pemanenan. 		
2.3.8	<p>Pengangkutan Buah.</p> <p>Pekebun memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pembeli untuk menghindari kerusakan buah.</p>	<p>Memiliki dan melaksanakan petunjuk teknis pengangkutan TBS.</p>		

Prinsip 3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati

NO.	STANDAR ISPO		KESESUAIAN	
	KRITERIA	INDIKATOR	YA	TIDAK
3.1	<p>Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.</p> <p>Pekebun swadaya harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kebunnya di lingkungannya masing-masing.</p>	<p>Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait terdekat sesuai Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.</p>		
3.2	<p>Pelestarian Keanekaragaman Hayati (biodiversity).</p> <p>Pekebun swadaya harus menjaga dan melestarikan keaneka ragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan di sekitar kebun dan sesudah dimulainya usaha perkebunan. Memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun. 		

Prinsip 4. Penerapan transparansi

NO.	STANDAR ISPO		KESESUAIAN	
	KRITERIA	INDIKATOR	YA	TIDAK
4.1	<p>Penjualan dan Kesepakatan Harga TBS.</p> <p>TBS dijual kepada perusahaan perkebunan dengan harga yang mengacu pada penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki informasi harga TBS berdasarkan penetapan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Tersedia catatan harga TBS dan realisasi pembelian oleh perusahaan/ pabrik dan tersedia sumber informasi harga untuk penetapan harga pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi secara rutin. 		
4.2	<p>Penyediaan Data & Informasi.</p> <p>Penyediaan data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> SOP pelayanan informasi. Mempunyai dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku Mempunyai dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan. 		

Prinsip 5. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

NO.	STANDAR ISPO		KESESUAIAN	
	KRITERIA	INDIKATOR	YA	TIDAK
5.1	<p>Meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.</p>	<p>Memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan.</p>		

LAMPIRAN

IFAS (INTERNAL FACTORS ANALYSIS SUMMARY) DAN EFAS (EXTERNAL FACTORS ANALYSIS SUMMARY) PENGEMBANGAN STRATEGI CAPAIAN SERTIFIKASI ISPO PEKEBUN KELAPA SAWIT SWADAYA DI KECAMATAN MORI UTARA

TINGKAT SIGNIFIKANSI :

5 = SANGAT SETUJU/SANGAT BAIK

4 = SETUJU/BAIK

3 = NETRAL/SEDANG

2 = TIDAK SETUJU/BURUK

1 = SANGAT TIDAK SETUJU/SANGAT BURUK

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT CAPAIAN ISPO

NO.	FAKTOR STRATEGIS	TINGKAT SIGNIFIKANSI				
		1	2	3	4	5
A.	FAKTOR PENDUKUNG					
1.	Organisasi Pekebun/Kelompok Tani: Keberadaan Kelompok Tani yang menjadi syarat mutlak untuk sertifikasi ISPO kelompok, memungkinkan koordinasi dan pendampingan.					
2.	Legalitas Kepemilikan Lahan: Mayoritas pekebun memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah (SHM, Girik, dll.) atau bukti penggarapan yang jelas dan pekebun telah memiliki STD-B.					
3.	Penggunaan Bibit Unggul: Semua pekebun di wilayah penelitian telah menggunakan bibit unggul sesuai rekomendasi Ditjenbun.					
4.	Motivasi Ekonomi: Harapan akan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik (harga premium) atau akses pasar yang lebih luas pasca-sertifikasi ISPO.					
5.	Pengalaman Usaha Tani: Pekebun yang lebih berpengalaman cenderung lebih sadar manfaat ISPO dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengimplementasikannya.					
6.	Dukungan PBS/PBN dalam sertifikasi ISPO: Potensi kolaborasi dengan PBS/PBN yang membutuhkan pasokan bersertifikat untuk memenuhi komitmen keberlanjutan mereka.					
7.	Sifat Mandatori ISPO: Adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 yang mewajibkan ISPO bagi semua pelaku usaha, termasuk pekebun swadaya (dengan batas waktu tertentu, misalnya 2025), menciptakan urgensi dan dukungan regulasi.					
8.	Dukungan Pemerintah/Lembaga Terkait: Adanya dukungan program pemerintah seperti sosialisasi ISPO, bimbingan teknis, dan fasilitasi dari Komisi ISPO atau Lembaga Sertifikasi (LS).					
9.	Tuntutan Pasar Global Berkelanjutan: Peningkatan permintaan minyak sawit berkelanjutan (sustainable palm oil) di pasar internasional, yang menjadikan ISPO sebagai alat daya saing dan penerimaan produk di pasar.					
10.	Perkembangan Teknologi: Kemudahan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi untuk penyuluhan berbasis digital (misalnya, aplikasi SawitKita) dan informasi pasar.					
11.	Insentif Harga: Potensi perbedaan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih tinggi untuk sawit bersertifikat ISPO di masa depan.					

NO.	FAKTOR STRATEGIS	TINGKAT SIGNIFIKANSI				
		1	2	3	4	5
B.	FAKTOR PENGHAMBAT					
1.	Pengetahuan dan Keterampilan: Kurangnya pengetahuan mengenai perkembangan terkini di bidang persawitan, budidaya kelapa sawit yang baik (GAP), dan persyaratan spesifik ISPO (prinsip, kriteria, dan prosedur ISPO).					
2.	Kapasitas Organisasi Lemah: Kelompok tani/koperasi seringkali belum optimal dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan kontrol rantai pasok.					
3.	Rendahnya Penerapan GAP: Praktik budidaya (penggunaan benih, pemupukan, pengendalian hama) masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar teknis ISPO.					
4.	Keterbatasan Modal & Biaya Sertifikasi: Biaya yang diperlukan untuk persiapan (pemetaan kebun, SOP) dan audit sertifikasi ISPO, yang relatif tinggi bagi pekebun swadaya, menjadi hambatan finansial.					
5.	Pencatatan dan Administrasi Kebun: Sistem pencatatan dan administrasi kebun (penggunaan pupuk, pestisida, hasil panen, dll.) yang masih lemah atau tidak terstruktur.					
6.	Isu Lingkungan dan Kampanye Negatif: Kampanye negatif dan tuntutan negara konsumen (misalnya, Uni Eropa) terkait pengelolaan sawit dan isu lingkungan (deforestasi, emisi GRK).					
7.	Regulasi ISPO yang Ketat: Kebijakan yang mengharuskan sertifikasi ISPO sebagai syarat ekspor atau penjualan, yang berisiko memarginalkan pekebun yang belum tersertifikasi.					
8.	Ketidakstabilan Harga CPO/TBS: Fluktuasi harga CPO/TBS yang dapat memengaruhi kemampuan finansial pekebun untuk berinvestasi dalam pemenuhan standar ISPO.					

**IDENTITAS RESPONDEN PETANI SWADAYA KELAPA SAWIT
KECAMATAN MORI UTARA**

NO.	NAMA	UMUR (THN)	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	USIA TANAMAN (THN)	LUAS LAHAN (HA)	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT
1	ABDUL KADIR LAODO	61	L	SMP	5	4,00	MPE ASA AROA	TABARANO
2	ALKHISER MITFERMAN	36	L	SMA	4	1,00	MPE ASA AROA	TABARANO
3	ALPEN BURIA	57	L	SMA	5	1,00	MPE ASA AROA	TABARANO
4	ALPING SANTRIA LANTIUNGA	35	L	SMA	6	1,00	MPE ASA AROA	TABARANO
5	BUNDELINO TAMU'U	52	L	SMP	7	2,00	MPE ASA AROA	TABARANO
6	DEKRIS RENDAH	57	L	SMP	7	3,00	MPE ASA AROA	TABARANO
7	DEWI WARTA MALAU	44	P	SMA	6	0,50	MPE ASA AROA	TABARANO
8	LIONAR KALEBI	57	L	SD	8	3,00	MPE ASA AROA	TABARANO
9	RUSMAN SAINO	40	L	S1	10	1,00	MPE ASA AROA	TABARANO
10	SARTIANUS KOMILE	52	L	SMA	8	1,50	MPE ASA AROA	TABARANO
11	SUHARJANI TADEHARI	60	P	SMP	9	1,00	MPE ASA AROA	TABARANO
12	YAN BENHART TUDON	56	L	SMA	5	3,00	MPE ASA AROA	TABARANO
13	YUSMAN DONALD TIKU	49	L	S1	5	2,30	MPE ASA AROA	TABARANO
14	YUSTUS BURIA	38	L	SMA	6	1,00	MPE ASA AROA	TABARANO
15	AMIREDI MANANGKE	42	L	SMA	8	1,00	MEKAR SARI	TABARANO
16	ARCELIN LALINDU	39	P	S1	8	1,00	MEKAR SARI	TABARANO
17	ARSON TAMPASORO	48	L	SMA	9	4,00	MEKAR SARI	TABARANO
18	DAMLIS BALEA	59	L	SMP	6	2,50	MEKAR SARI	TABARANO
19	HENDRA LAEMBA	67	L	SD	7	0,50	MEKAR SARI	TABARANO
20	HERSON PALIOMO	59	L	SMP	10	1,50	MEKAR SARI	TABARANO
21	JUNIOR MELALO	59	L	SD	10	0,80	MEKAR SARI	TABARANO
22	YAPTICES MELALO	44	L	SMA	7	1,00	MEKAR SARI	TABARANO
23	YOHAN FREDERIK MPILA	52	L	SMA	7	1,00	MEKAR SARI	TABARANO
24	YORNALIAS LASAMPA	57	L	SMP	6	1,00	MEKAR SARI	TABARANO
25	YOSTERMAN LAINO	59	L	SMA	5	3,00	MEKAR SARI	TABARANO
26	YUSTINUS MASU'S	67	L	SD	7	0,50	MEKAR SARI	TABARANO
27	AHMAD NURHADI	38	L	SMA	3	4,00	SUMBER MAKMUR	LEMBONTONARA
28	DARYATMO TANDOWALA, SP	45	L	S1	11	4,00	SUMBER MAKMUR	LEMBONTONARA
29	DARWATI	40	P	SMP	5	4,00	SUMBER MAKMUR	LEMBONTONARA
30	MOHAMAD SODIKIN	48	L	SMA	4	2,00	SUMBER MAKMUR	LEMBONTONARA
31	MUHAMAD ZUHRI	48	L	SMA	5	4,00	SUMBER MAKMUR	LEMBONTONARA
32	PARTONO	37	L	SMA	5	3,00	SUMBER MAKMUR	LEMBONTONARA
33	SISWANTO, SP	45	L	S1	5	4,00	SUMBER MAKMUR	LEMBONTONARA
34	SRI TOTAL WAHYUNI	43	P	SMA	5	4,00	SUMBER MAKMUR	LEMBONTONARA
35	ABDUL SUKUR	37	L	SMP	4	3,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
36	AHMAD YURI	50	L	SMA	3,5	4,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
37	DENYU IRAWAN	37	L	SMP	3	2,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
38	HARSONO	53	L	SMP	3,5	2,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
39	JUMARI	33	L	SMP	4	1,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
40	JUMIRIN	52	L	SD	4	1,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
41	NGATIRIN	50	L	SD	4	4,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
42	NGATNO AGUS PRIONO	41	L	SMA	3,5	3,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
43	MUH. RIKAN	43	L	SMP	3,5	4,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
44	MUHAMAD RATMAN	43	L	SMA	3,5	2,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
45	PONIDI	48	L	SD	3	4,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
46	ROHANI	35	L	SD	3	4,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
47	SABAR WIBOWO	37	L	SMA	3,5	1,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
48	SRIWIDODO	54	L	SD	3	4,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
49	SUDARSONO	48	L	SMP	4	2,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
50	SUKEDI	60	L	SMP	4	3,50	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
51	SUPARNO PUTRA	35	L	SMA	3,5	1,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
52	SURON	52	L	SMP	3,5	2,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
53	SUTEKNO	60	L	SD	4	1,50	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA

NO.	NAMA	UMUR (THN)	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	USIA TANAMAN (THN)	LUAS LAHAN (HA)	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT
54	YUDI HARTONO	45	L	SMP	4	4,00	GUNUNG KIDUL	LEMBONTONARA
55	BINARMAN	53	L	SD	2	4,00	SUMBER REZEKY	LEMBONTONARA
56	BINARTO	50	L	SD	2	2,00	SUMBER REZEKY	LEMBONTONARA
57	TARIYAH	86	P	SD	2	2,00	SUMBER REZEKY	LEMBONTONARA
58	SIGIT SETIAWAN	34	L	SMA	1,5	2,00	SUMBER REZEKY	LEMBONTONARA
59	SUGIARTO	37	L	SMA	3	2,00	SUMBER REZEKY	LEMBONTONARA
60	SUYETNO	45	L	SD	2	2,00	SUMBER REZEKY	LEMBONTONARA
61	YUDITULA	38	L	SMA	4	2,00	SUMBER REZEKY	LEMBONTONARA
62	IRMAWATI	46	P	SMA	3	4,00	MANDIRI	PELERU
63	ISNA	21	P	SMP	3	4,00	MANDIRI	PELERU
64	MAHMUDIN. P	49	L	SMP	3	4,00	MANDIRI	PELERU
65	MARLINA	56	P	SD	4	4,00	MANDIRI	PELERU
66	MILDA LAMATTA	45	P	S1	3	4,00	MANDIRI	PELERU
67	MUNDULIU LAPASILA	86	L	SMP	3	4,00	MANDIRI	PELERU
68	RIZKI RIFANDY	29	L	SMA	3	4,00	MANDIRI	PELERU
69	SAIDIL	39	L	SMP	3	4,00	MANDIRI	PELERU
70	TITIN SRI RAHAYU	32	P	SMA	3	4,00	MANDIRI	PELERU
71	WINA NURYANA	37	P	SMA	3	4,00	MANDIRI	PELERU
72	YAN PASLAK. M	34	L	S1	3	4,00	MANDIRI	PELERU

Matriks Pengukuran Tingkat Capaian ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya Desa Tabarano Kec. Mori Utara

Responden	P1							P2										P3			P4					P5							
	K1		K2		K3		K4		K5		K6		K7		K8		K9		K10		K1			K1		K1							
	I1	I1	I1	I2	I1	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I1	I1	I2	I1	I2	I3	I1						
1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0					
2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0					
3	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0					
4	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0					
5	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0					
6	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0					
7	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0					
8	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0					
9	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0					
10	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0					
11	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0					
12	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0					
13	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0					
14	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0					
15	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0					
16	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0					
17	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0					
18	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0					
19	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0					
20	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0					
21	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0					
22	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0					
23	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0					
24	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0					
25	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0					
26	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0					
Total Indikator terpenuhi	26	26	9	7	26	1	0	26	26	20	24	6	26	26	24	24	3	17	25	12	15	25	25	23	26	20	0	26	26	4	25	16	0
Jumlah Indikator	182,00							442,00										78,00			130,00					26,00							
Capaian Prinsip	95,00							347,00										46,00			97,00					0,00							
Bobot Nilai Prinsip(%)	21,21							51,52										9,09			15,15					3,03							
Capaian Nilai Prinsip (%)	11,07							40,44										5,36			11,31					0,00							

Matriks Pengukuran Tingkat Capaian ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya Desa Lembontonara Kec. Mori Utara

Responden	P1							P2										P3			P4					P5										
	K1		K2		K3		K4	K5		K1		K2		K3		K4		K5		K6		K7		K8		K9		K10	K1		K2		K1			K1
	I1	I1	I1	I2	I1	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I1	I2	I1	I2	I3	I1		
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0		
2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0		
4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1		
5	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1		
6	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1		
7	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	
9	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	
10	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0		
11	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0		
12	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0		
13	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		
14	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0		
15	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		
16	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1		
17	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0		
18	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
19	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
20	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	
21	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0		
22	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1		
23	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
24	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
25	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0		
26	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0		
27	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		
28	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0		
29	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0		
30	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
31	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
32	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1		
33	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1		
34	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		
35	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0		
Total Indikator terpenuhi	35	35	30	25	32	17	8	35	35	34	33	32	35	35	15	15	0	26	33	34	34	35	20	29	35	22	6	35	35	35	35	33	17			
Jumlah Indikator	245,00							595,00										105,00			175,00					35,00										
Capaian Prinsip	182,00							480,00										63,00			173,00					17,00										
Bobot Nilai Prinsip(%)	21,21							51,52										9,09			15,15					3,03										
Capaian Nilai Prinsip (%)	15,76							41,56										5,45			14,98					1,47										

Matriks Pengukuran Tingkat Capaian ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya Desa Peleru Kec. Mori Utara

Responden	P1							P2										P3			P4					P5									
	K1		K2		K3		K4	K5		K1		K2		K3		K4		K5		K6	K7		K8		K9		K10		K1		K2		K1		K1
	I1	I1	I1	I2	I1	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I2	I1	I1	I2	I1	I2	I3	I1			
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0			
2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0			
3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0			
4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0			
5	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0			
6	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0			
7	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0			
8	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0			
9	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0			
10	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0			
11	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0			
Total Indikator terpenuhi	11	11	11	11	11	11	0	11	11	11	11	11	11	11	11	0	11	11	11	3	11	1	11	11	11	0	11	8	11	11	11	0			
Jumlah Indikator	77,00							187,00										33,00			55,00					11,00									
Capaian Prinsip	66,00							158,00										22,00			52,00					0,00									
Bobot Nilai Prinsip(%)	21,21							51,52										9,09			15,15					3,03									
Capaian Nilai Prinsip (%)	18,18							43,53										6,06			14,33					0,00									

p

Matriks Penilaian Bobot IFAS (Internal Factors Analysis Summary) Dan EFAS (External Factors Analysis Summary) Pengembangan Strategi Capaian Sertifikasi Ispo Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Di Kecamatan Mori Utara

Responden	SKOR KONDISI FAKTOR STRATEGIS																		
	FAKTOR PENDUKUNG											FAKTOR PENGHAMBAT							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	5	4	1	1	1	2	3	2	2	4	3	3	3	3	4	2	3	2
2	5	5	4	1	2	1	3	3	2	2	4	4	2	2	3	4	1	2	3
3	2	5	4	2	2	1	4	3	1	4	4	4	3	2	3	3	1	2	2
4	5	4	3	2	2	2	4	1	2	2	4	4	3	3	3	3	2	2	1
5	4	3	4	1	2	1	3	3	2	2	3	3	3	3	4	4	1	2	2
6	4	4	3	1	1	1	3	3	1	2	3	5	2	3	4	4	2	3	3
7	3	4	3	2	1	1	5	3	2	5	4	3	3	2	5	3	2	2	2
8	3	2	3	2	1	2	3	3	2	3	4	4	2	2	3	4	1	3	2
9	4	3	4	1	3	1	3	3	2	2	4	4	3	2	3	4	1	2	2
10	5	3	3	2	3	1	4	2	2	5	4	3	1	3	3	3	1	3	2
11	3	2	5	1	3	1	2	3	2	5	3	4	2	3	3	3	3	3	2
12	4	4	5	1	2	1	3	3	2	2	4	4	2	3	4	2	1	2	1
13	3	3	5	1	3	1	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2
14	2	3	3	3	2	1	4	3	2	4	3	4	3	2	4	2	1	3	2
15	3	3	4	1	2	2	3	2	3	4	3	5	2	3	3	3	1	2	2
16	4	3	3	2	4	1	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
17	3	2	3	1	2	2	2	2	2	3	4	4	2	3	3	4	1	1	1
18	4	3	3	2	1	1	4	3	3	3	3	4	3	1	5	2	3	1	2
19	3	3	5	2	1	1	3	3	3	2	3	3	2	1	4	2	1	2	2
20	3	4	3	1	2	2	3	3	2	3	3	4	2	3	3	5	1	1	3
21	4	3	3	2	1	1	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3
22	3	2	4	1	3	2	3	2	2	2	4	5	2	2	3	4	2	2	1
23	5	3	4	2	3	2	3	3	1	3	4	3	1	3	3	5	1	2	3
24	3	3	3	1	1	3	2	2	2	3	3	5	2	3	3	3	2	3	2
25	4	3	3	3	2	2	4	3	1	2	4	3	2	5	4	3	1	2	3
26	3	2	5	1	2	1	3	2	1	1	4	5	2	3	3	4	1	1	2
27	5	3	4	2	3	1	4	3	3	2	4	4	3	2	3	5	2	1	2
28	3	2	3	1	1	3	3	3	1	4	4	3	3	3	4	5	1	2	2
29	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	4	5	2	3	1
30	3	3	3	2	2	1	3	2	1	4	3	2	3	3	5	2	3	2	2
31	5	3	3	2	3	2	4	3	2	5	4	4	2	2	3	4	1	4	2
32	3	4	3	1	2	2	3	3	3	5	4	5	3	3	5	3	1	3	2
33	4	5	4	1	3	1	5	3	3	2	5	3	2	4	5	4	2	3	2
34	4	5	5	3	3	2	3	3	2	2	4	4	3	3	3	3	1	2	2
35	3	4	5	2	2	2	4	2	3	2	3	5	2	4	3	4	2	3	3

Responden	SKOR KONDISI FAKTOR STRATEGIS																		
	FAKTOR PENDUKUNG											FAKTOR PENGHAMBAT							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8
36	3	5	3	2	3	1	5	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
37	5	3	4	1	2	1	3	2	3	3	4	4	3	3	3	4	1	4	2
38	5	3	3	1	2	3	4	3	3	1	5	4	3	3	4	3	1	3	2
39	3	3	3	1	3	1	4	2	2	3	5	2	3	2	3	4	2	2	3
40	4	4	4	2	2	1	2	3	1	1	3	4	3	2	3	3	3	3	2
41	3	3	3	2	2	2	4	3	2	1	5	4	2	1	4	3	1	4	5
42	4	3	4	2	2	1	5	3	1	3	2	2	3	3	3	3	1	4	3
43	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	1	3	3	1	3	2
44	3	5	3	1	3	1	3	3	3	2	4	3	2	3	3	4	2	2	2
45	2	3	3	2	1	2	4	2	1	2	4	2	3	3	3	4	2	2	3
46	3	3	4	1	2	1	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	1	1	3
47	3	3	3	1	1	3	4	5	3	3	4	4	3	3	5	5	1	3	3
48	3	4	3	2	1	1	3	3	3	1	3	4	2	4	3	4	1	1	2
49	3	3	3	1	1	2	4	3	2	3	4	2	3	3	3	2	2	3	2
50	3	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	5	4	1	1	3
51	3	3	3	2	3	1	5	2	3	1	3	4	2	3	5	4	1	2	2
52	5	2	3	1	2	1	4	4	2	3	3	4	3	2	5	3	2	3	4
53	3	2	5	1	2	3	5	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	2
54	3	2	3	1	3	1	5	4	3	3	2	3	3	2	3	3	1	2	3
55	4	2	3	1	3	3	4	3	3	2	3	3	2	2	4	3	2	1	3
56	3	2	3	1	2	1	2	4	2	3	3	5	3	3	3	4	1	2	4
57	3	3	3	2	4	1	4	3	4	3	3	5	5	2	3	3	1	1	3
58	4	3	3	1	2	1	4	4	3	3	4	3	3	3	5	3	2	2	2
59	3	3	4	1	3	1	3	4	3	1	3	4	3	4	5	4	1	2	2
60	3	3	3	2	5	3	4	3	3	3	4	3	4	3	5	4	1	2	3
61	3	4	3	1	1	1	3	4	3	3	3	5	3	2	3	5	2	1	3
62	2	3	5	1	3	1	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3
63	3	3	3	1	2	2	3	3	3	1	3	5	2	3	3	5	2	1	3
64	5	3	3	2	3	1	4	3	2	2	3	3	3	3	3	4	1	1	2
65	5	4	4	1	2	2	3	5	4	2	3	4	2	2	3	4	2	1	3
66	3	3	3	1	1	1	5	3	2	2	3	3	3	2	5	3	1	3	5
67	3	3	3	2	1	1	4	4	3	3	2	4	3	3	5	5	1	3	2
68	5	3	3	1	4	2	4	4	2	3	3	3	2	3	4	2	2	2	5
69	5	4	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	1	3	4
70	5	3	3	1	2	1	4	5	2	2	3	4	3	3	3	5	1	1	2
71	3	3	3	2	1	2	5	2	4	2	3	3	3	3	3	4	1	2	3
72	3	2	3	1	2	1	3	3	2	1	3	3	2	3	3	5	1	2	2
Total Rating	256	230	250	107	157	107	254	215	167	186	248	259	189	197	258	257	107	160	178
Rata-Rata Rating	4	3	3	1	2	1	4	3	2	3	3	4	3	3	4	4	1	2	2

DOKUMENTASI KEGIATAN







PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KECAMATAN MORI UTARA
Desa Mayumba Kecamatan Mori Utara

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAN ADRIAN BAMOTIWA, SE
NIP : 19751101 201001 1 001
Jabatan : Camat Mori Utara


Dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : NURSYAMSA PATALOLO, SP
Stambuk : E32224012
Program Studi : Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Kecamatan Mori Utara mulai bulan Oktober s/d Desember 2025 dengan judul penelitian "*Analisis Capaian Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya (Studi Kasus di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara)*"

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mayumba, 2 Januari 2026

CAMAT MORI UTARA,

WAN ADRIAN BAMOTIWA, SE
NIP: 19751101 201001 1 001